



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA BIMA

TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2016

Jl. Soekarno - Hatta No. 02 Telp./Fax. (0374) 43990 Raba-Bima
www.dukcapil.bimakota.go.id

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Konsep dan Definisi	3
E. Sumber Data.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DAERAH	8
A. Letak Geografis	8
B. Visi	11
C. Misi	11
D. Administrasi Pemerintahan Daerah	13
E. Ekonomi	15
F. Sosial Budaya dan Agama	15
G. Transportasi dan Komunikasi	16
BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG	
KUANTITAS PENDUDUK	17
A. Komposisi Penduduk Menurut Demografi	17
1. Jumlah Penduduk	17
2. Jumlah Penduduk Umur dan Jenis Kelamin	19
3. Rasio Kepadatan Penduduk (<i>Population Density Ratio</i>)	25
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	27
1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	27
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	28
3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan	30
4. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	32



C. Keluarga	38
1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	38
2. Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga.....	40
3. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin.....	41
4. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status kawin	42
5. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan	43
6. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja.....	44
D. Kelahiran (Fertilitas)	45
1. Jumlah Kelahiran	47
2. Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate/CBR</i>).....	48
E. Kematian (Mortalitas)	49
1. Jumlah Kematian	50
2. Angka Kematian Kasar	51
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KUALITAS PENDUDUK	53
A. Kesehatan.....	55
1. Fertilitas (Kelahiran)	55
2. Mortalitas (Kelahiran).....	57
B. Pendidikan	60
1. Angka Melek Huruf (AMH)	60
2. Angka Partisipasi Murni (APM)	61
3. Angka Partisipasi Kasar (APK)	63
4. Angka Pendidikan yang ditamatkan	65
C. Ekonomi	65
1. Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja).....	66
2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	70
3. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	71
4. Pengangguran (Angkatan Kerja yang belum/tidak bekerja) Dan Tingkat Pengangguran	73
D. Sosial	75
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	75
2. Penduduk Miskin	77
BAB V MOBILITAS PENDUDUK	80
Migrasi (Mobilitas Permanen)	80
BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	83
A. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	83



B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.....	85
C. Kepemilikan Akta	85
D. Pengakuan, Pengesahan dan pengangkatan Anak dan Peristiwa Penting Lainnya.....	89
BAB VII PENUTUP	91

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 2.1.	Keadaan Geografi Kota Bima Tahun 2015.....	10
Tabel. 2.2.	Pembagian Wilayah Adminstrasi Kota Bima Tahun 2015	13
Tabel. 2.3.	Keadaan Sosial Budaya dan Agama di Kota Bima	15
Tabel. 3.1.	Jumlah Penduduk Kota Bima Tiap Kecamatan/Kelurahan Tahun 2015	17
Tabel. 3.2.	Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2015.....	20
Tabel. 3.3.	Jumlah Penduduk Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2015.....	21
Tabel. 3.4.	Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Produktif Tahun 2015.....	24
Tabel. 3.5.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Bima Tahun 2015	25
Tabel. 3.6.	Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir tahun 2015	27
Tabel. 3.7.	Jumlah Penduduk Menurut Agama & Kepercayaan Tahun 2015.....	29
Tabel. 3.8.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan	31
Tabel. 3.9.	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin	33
Tabel. 3.10.	Angka Perkawinan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	35
Tabel. 3.11.	Angka Perkawinan Menurut Umur Tahun 2015.....	36
Tabel. 3.12.	Angka Perceraian Kasar Menurut Kecamatan Di Kota Bima	37
Tabel. 3.13.	Angka Perceraian Umum Menurut Kecamatan Di Kota Bima.....	38
Tabel. 3.14.	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Bima Tahun 2015	
Tabel. 3.15.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Kota Bima Tahun 2015	40
Tabel. 3.16.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Bima	41
Tabel. 3.17.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin di Kota Bima Tahun 2015	42
Tabel. 3.18.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2015	44
Tabel. 3.19.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja di Kota Bima Tahun 2015	45
Tabel. 3.20.	Tabel Jumlah Kelahiran Hidup Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2015	47



Tabel. 3.21.	Angka Kelahiran Kasar berdasarkan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015	49
Tabel. 3.22.	Jumlah Kematian menurut Wilayah Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bima Tahun 2015	50
Tabel. 3.23.	Angka Kematian Kasar Kota Bima Tahun 2015	51
Tabel. 4.1.	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	55
Tabel. 4.2.	Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ration/CWR) Kota Bima Tahun 2015	57
Tabel. 4.3.	Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2015	58
Tabel. 4.4.	Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate-MMR) Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015	59
Tabel. 4.5.	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bima.....	61
Tabel. 4.6.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 s.d Tahun 2015 Kota Bima	62
Tabel. 4.7.	Angka Partisipasi Murni Tahun 2015 Menurut Kecamatan	63
Tabel. 4.8.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 s.d Tahun 2015 Kota Bima	64
Tabel. 4.9.	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2010 s.d Tahun 2015	65
Tabel. 4.10.	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Bima Tahun 2015.....	67
Tabel. 4.11.	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2015.....	69
Tabel. 4.12.	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja, Angka Penyerapan Angkatan Kerja Tahun 2015	70
Tabel. 4.13.	Tabel Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang bekerja, Angka Penyerapan Angkatan Kerja, Kota Bima di Kota Bima Tahun 2015.....	71
Tabel. 4.14.	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang belum/tidak Bekerja, Angka Pengangguran menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin, Kota Bima Tahun 2015	73
Tabel. 4.15.	Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Kota Bima Tahun 2015	75
Tabel. 4.16.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Kota Bima Tahun 2010 s/d Tahun 2015	78
Tabel. 4.17.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bima	79
Tabel. 5.1.	Jumlah Migrasi Masuk, Jumlah Migrasi Keluar, Angka Migrasi Masuk,	



	Angka Migrasi Keluar dan Angka Migrasi Neto Menurut Kecamatan Kota Bima Tahun 2015	81
Tabel. 5.2.	Angka Migrasi Masuk, Angka Migrasi Keluar dan Angka Migrasi Neto Menurut Kecamatan Kota Bima Tahun 2015.....	82
Tabel. 6.1.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Bima Tahun 2015.....	84
Tabel. 6.2.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bima Tahun 2015	85
Tabel. 6.3.	Jumlah Pencatatan Kelahiran Menurut Wilayah Kecamatan Kota Bima Tahun 2015	87
Tabel. 6.5.	Jumlah Pencatatan Perkawinan Kota Bima Tahun 2015	87
Tabel. 6.6.	Jumlah Pencatatan Kematian Kota Bima Tahun 2015.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Bima	8
--	---

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Bima	19
Grafik 2. Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2015	23
Grafik 3. Jumlah Penduduk Kota Bima Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015	28
Grafik 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Bima Tahun 2015	30
Grafik 5. Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Kota Bima Tahun 2015	31
Grafik 6. Jumlah Kelahiran Hidup Kota Bima Tahun 2015	48
Grafik 7. IPM Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2008 – 2013	54



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka keadaan yang demikian itu menuntut pengembangan sistem administrasi kependudukan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengelola dan menyajikan data Kependudukan berskala pada pasal 21 ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban pengelolaan Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan dibutuhkan sebagai data informasi pertambahan dan perkembangan penduduk serta persebarannya guna perencanaan pembangunan di daerah.

Data Informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan yang objektif dalam menetapkan suatu kebijakan dalam perencanaan dan strategi pembangunan kedepan serta evaluasi dimasa lalu. Pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat membawa dampak dari adanya pertambahan penduduk, untuk diketahui keadaan penduduk dan persebaran dengan berbagai kualitas yang dimiliki diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis yang jelas dan teratur dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran.

Penyusunan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang baik memerlukan dukungan dan kerja sama yang baik pula antara kecamatan yang ada di Kota Bima sehingga ketersediaan data yang lebih akurat, terkini/tepat waktu, relevan, komprehensif, konsisten dan berkesinambungan. Hal ini juga berlaku untuk data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan kependudukan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan pendayagunaan data SIAK akan dapat dilakukan secara optimal, akurat dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pembangunan daerah.



Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek – aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bima dalam mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran. Kesejahteraan masyarakat menjadi latar belakang dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perkembangan penduduk di Kota Bima baik perkembangan masa lampau maupun perkembangan kedepannya, gambaran secara statistik menyangkut variabel jumlah penduduk, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan dan kematian sebagai sumber data yang disusun setiap tahun sehingga dapat dicapai sasaran yang diinginkan dari setiap kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.

Jumlah penduduk disuatu daerah merupakan potensi pembangunan yang besar jika berkualitas, sebaliknya jika suatu wilayah memiliki jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi kualitasnya rendah maka justru akan menjadi beban bagi proses pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun tujuan spesifik pada penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini sebagai berikut :

1. Untuk mereview dan memberikan gambaran tentang perkembangan kependudukan di Kota Bima.
2. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap situasi kependudukan pada tingkat Kota dan Kecamatan untuk kemudian dipergunakan sebagai penetapan kebijakan dan program.
3. Memberi saran dan rekomendasi dalam rangka upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan komitmen para perencana dan pelaku pembangunan tentang isu dan persoalan kependudukan.



C. Ruang Lingkup

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Konsep dan Definisi

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain .
4. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan atau data agregat yang struktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai.
8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas Administrasi Daerah Tingkat II.



9. **Profil** adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal – hal tertentu
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan
11. **Penyebaran Penduduk** adalah upaya mengubah sebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
12. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
13. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana
14. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. **Nomor Induk Kependudukan** adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
18. **Data** adalah fakta yang ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam bentuk media.
19. **Sumber data** adalah segala sesuatu tentang fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau rekam kedalam berbagai bentuk media oleh instansi / lembaga.
20. **Fertilitas** diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita



- untuk melahirkan dalam jangka waktu satu generasi atau selama masa subur.
21. **Kematian atau Mortalitas** adalah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk
 22. **Angka Kelahiran Total** adalah rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan masa reproduksinya.
 23. **Ratio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki – laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu.
 24. **Perkembangan Kependudukan** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup
 25. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
 26. **Mobilitas penduduk permanen (Migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (Migran Internal) atau batas politik/ Negara (Migrant Internasional).
 27. **Mobilitas penduduk non permanen** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative.
 28. **Migrasi Kembali** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda.
 29. **Migrasi seumur hidup** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya.
 30. **Migrasi risen** adalah bentuk migrasi melewati batas administrasi (desa/Kec/Kab/Provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
 31. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.



32. **Penduduk usia kerja angkatan kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
33. **Angka partisipasi angkatan kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
34. **Angkatan Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
35. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk usia 64 tahun keatas.
36. **Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda – tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
37. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda – tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
38. **Angka Kematian bayi/ IMR** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9 – 11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
39. **Angka Kematian Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
40. **Angka partisipasi total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu 7 – 12, 13 – 15, 16 – 18, dan 19 – 24 tahun.
41. **Angka partisipasi murni** adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7 – 12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13 – 15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16 – 18 tahun dan jumlah peserta didik PTN / PTS usia 19 – 24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing – masing jenjang pendidikan.
42. **Angka partisipasi kasar** adalah persentase jumlah peserta didik SD, jumlah peserta didik SLTP, jumlah peserta didik SLTA, jumlah peserta didik PTN / PTS dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia masing – masing jenjang pendidikan (SD usia 7-12 tahun, SLTP usia 13 – 15 tahun, SLTA usia 16-18 tahun, PTN/PTS usia 19 – 24 tahun).



E. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan di dalam penulisan ini merupakan data yang di ambil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang berhubungan dengan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2015 disajikan atas VII (tujuh) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum dan Potensi Daerah
- BAB III : Perkembangan Penduduk di Bidang Kuantitas Penduduk
- BAB IV : Perkembangan Penduduk di Bidang Kualitas Penduduk
- BAB V : Mobilitas Penduduk
- BAB VI : Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- BAB VII : Penutup

Dalam segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Profil Kependudukan Kota Bima Tahun 2015 selalu dilakukan perbaikan baik dari segi materi, analisis, maupun bentuk tampilan fisiknya disesuaikan dengan pedoman pusat yang mengacu pada indikator penunjang demi tercapainya informasi kependudukan yang akurat dan terbaharukan.

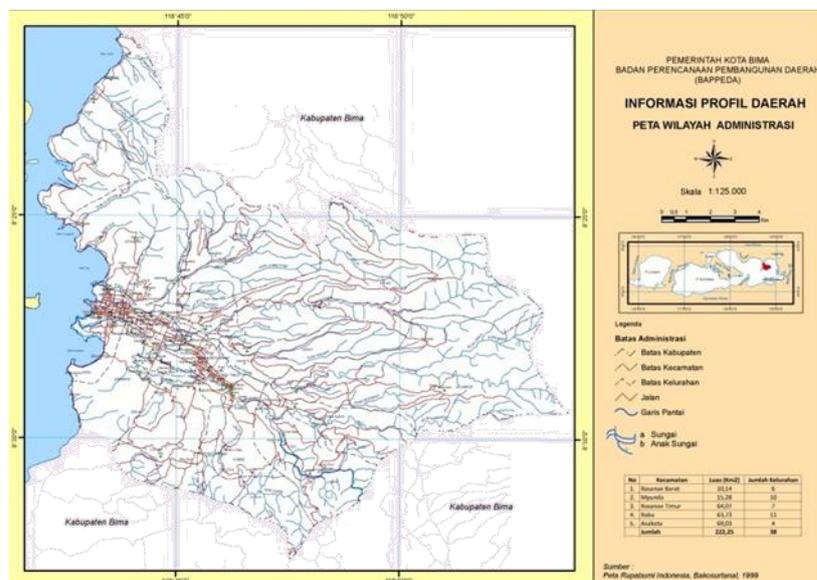
BAB II GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DAERAH

A. Letak Geografis

Kota Bima merupakan salah satu Kota dari 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 222,25 Km². Secara geografis letak Kota Bima berada pada 118°41' – 118°48' Bujur Timur dan 8°30'–8°20' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
Sebelah Timur	:	Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
Sebelah Barat	:	Teluk Bima.

Peta Kota Bima



Gambar.1 : Peta Wilayah Kota Bima

Berdasarkan data statistik dari lembaga Meteorologi dan Geofisika wilayah Bima, temperatur maksimum sepanjang tahun sekitar 36,8°C dan temperatur minimum sekitar 20,9°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Juli. Sebagai daerah tropis, Kota Bima mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu sekitar 77,8 persen.



Faktor geografi yang dimaksud antara lain mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula menghambat. Tersedianya sumber daya alam (SDA) merupakan faktor yang menunjang pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.

Wilayah Kota Bima sebagian besar tanahnya berada pada kemiringan 0 - 2% (datar) seluas 9.442 Ha, kemiringan 2-15% (bergelombang) dengan luas 5.292Ha, kemiringan 15-40% (curam) 4.534 Ha, dan di atas 40% (sangat curam) 2.957 yaitu kurang lebih 13.30% dari luas wilayah, sedangkan kemiringan tanah antara 2-15% kurang lebih 23.81% dari luas wilayah.

Sumber daya Alam baik yang terkandung di daratan, sungai, maupun dilaut merupakan potensi ekonomi yang besar. Pengelolaan dan peningkatan sumber daya secara efisien dan efektif akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kependudukan.

Di Kota Bima terdapat berbagai sumber daya alam (SDA), diantaranya yang menjadi andalan adalah sebagai berikut :

- Pertanian
- Pertambangan/Galian dan Perdagangan.
- Wisata Pantai dan Wisata Alam

Rencana tata ruang Kota Bima yang berwawasan lingkungan harus dijadikan pedoman terpadu Pembangunan agar tatanan lingkungan lingkup dan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna, berhasil guna secara berkelanjutan. Berhubungan dengan rencana tata ruang tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perlu diperhatikan hal-hal antara lain :

- Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih fungsikan atau dipinjamkan



- menjadi kawasan apapun;
- Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Tabel.2.1
Keadaan Geografi Kota Bima Tahun 2015

No	Variabel	Jumlah
1	Sumber Daya Alam andalan	- Pertanian
		- Perdagangan
		- Pertambangan / Galian
		- Wisata Pantai / Wisata Alam
2	Keadaan Alam	
	- Musim Kemarau (bulan)	8 Bulan
	- Musim Hujan (bulan)	4 Bulan
	- Curah Hujan (mm)	77,7 mm

Sumber : Stasiun Meteorologi M.Salahuddin Bima dan Kota Bima Dalam Angka 2009/2010.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi Perkembangan kependudukan.

Musim kemarau di Kota Bima biasanya pada bulan April sampai bulan Nopember, sedangkan musim hujan terjadi bulan Desember sampai bulan Maret, dan curah hujan rata-rata adalah 77,7 mm , curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 281 mm, dan terendah terjadi pada bulan Juni s/d Juli yaitu sebesar 0,9 mm.



B. Visi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan, agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Hal tersebut memerlukan suatu kerangka pemikiran upaya yang terstruktur untuk memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) memperbaiki kinerja sektor publik dan mengobati praktek administrasi yang tidak sehat.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan administrasi kependudukan yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi dan visi tidak hanya penting pada waktu berkarya, tetapi juga pada kehidupan berorganisasi itu selanjutnya yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa.

Pengertian Visi adalah suatu pandangan yang jauh kedepan kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif atau suatu gambaran tentang keadaan di masa depan berisikan cita dan citra yang ingin dicapai.

Visi Pemerintah Daerah Kota Bima, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2013 – 2018, yang hendak dicapai adalah :

"TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA".

C. Misi

Pimpinan suatu organisasi harus memastikan agar visi sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya di



seluruh unsur organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program – program serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka misi Pemerintah Kota Bima adalah :

- Misi Pertama** : “Membentuk manusia yang beriman melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal”.
- Misi Kedua** : “Menciptakan manusia yang maju melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.
- Misi Ketiga** : “Mewujudkan masyarakat yang adil melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.



Misi Keempat : “Menjadikan masyarakat sejahtera berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai yang diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional”.

D. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bima Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. Nae	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
Jumlah I			10,14
2	Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	1,52
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. O'i Fo'o	9,2
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
Jumlah II			64,07
3	Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	22,18
		3. Kel. Jatibaru	19,6
		4. Kel. Kolo	26,49
Jumlah III			68,27
4	Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. PenanaE	5,34
		3. Kel. Rite	1,84



		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
Jumlah IV			62,99
4	Mpunda	1. Kel. SambinaE	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
Jumlah V			15,28
Jumlah I+II+III+IV+V			220,75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Kota Bima sebagai satu wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan disegala bidang, termasuk bidang kependudukan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan kependudukan di Kota Bima tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan Kota Bima.

Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kependudukan di Kota Bima harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah Kota Bima, untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kota Bima terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan terbagi dalam 38 (tiga puluh delapan) kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 222,25 Km² (tabel 2.2)



E. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagai mana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang.

Jumlah Koperasi yang sudah berbadan hukum di Kota Bima sebanyak 133 buah dengan rincian KUD 3 (tiga) buah, Koperasi Pegawai Negeri/PKPN 21 buah, jenis koperasi lainnya 109 buah.

F. Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang masih sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat adalah masih menghormati mereka yang lebih tua darinya, rasa tenggang rasa, masih patuh pada orang yang sangat dihormati dan tidak mudah diprovokasi.

Tabel.2.3
Keadaan Sosial Budaya dan Agama di Kota Bima
Tahun 2015

Variabel	Jumlah	Variabel	Jumlah
Sosial Budaya dan Agama		- Gereja	4
a. Keagamaan :		- Pura	3
- Islam	135.824		
- Protestan	1.111	c. Kesehatan :	
- Katolik	644	- Rumah Sakit	2 buah
- Hindu	241	Klinik	2 Unit
- Budha	31	- Puskesmas	5 Unit
- Konghucu	0	- Puskesmas Pembantu	16 Unit
b. Tempat Ibadah		- Puskesmas Keliling	6



- Mesjid	122	- Polindes	36
- Musholla	132	- Posyandu	148
- Langgar/Surau	70	- Laboratorium Klinik	3

Gambaran Keadaan sosial budaya dan keagamaan di Kota Bima dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 135.824 orang (97,72%), Protestan sebanyak 1.111 orang (1,20%), Katholik 644 orang (0,67%), Hindu sebanyak 241 orang (0,36%) dan Budha sebanyak 31 orang (0,05%). Untuk mengamalkan ibadahnya pemeluk agama tersebut didukung oleh 122 Mesjid, 132 Mushola, 70 Langgar/Surau, 4 Gereja, dan 3 Pura.

Keadaan kesehatan masyarakat di Kota Bima dapat digambarkan bahwa gizi masyarakat pada umumnya bervariasi yaitu ada yang baik, kurang baik atau buruk dengan rincian 75% baik, 25% kurang, dan 0% buruk dengan angka harapan hidup 55 tahun, yang didukung oleh puskesmas induk sebanyak 5 buah, puskesmas pembantu 16 buah, puskesmas keliling 6 buah, polindes 36 buah, posyandu 148 buah dan rumah sakit sebanyak 1 buah serta laboratorium klinik 3 buah. Jumlah puskesmas terhadap kecamatan adalah 100%, bila setiap kecamatan diharuskan memiliki 1 puskesmas, maka tidak ada Kecamatan di wilayah Kota Bima yang belum memiliki puskesmas.

G. Transportasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Transportasi merupakan alat angkut baik transportasi darat (bus, mobil pribadi, sepeda motor, sepeda dan lain-lain) dan transportasi perairan (Kapal laut, motor boat, perahu dan lain-lain) dan transportasi udara, sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai perkotaan, daerah perbatasan sampai daerah terpencil.



BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KUANTITAS PENDUDUK

A. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT DEMOGRAFI

1. Jumlah Penduduk

Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/kota. Kota Bima dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi jika tidak serius ditangani akan menjadi masalah yang krusial, apalagi jika jumlah ini dikaitkan dengan luas wilayah, maka permasalahan kepadatan penduduk di Kota Bima sangat riskan. Karena semakin padatnya suatu wilayah, maka akan berakibat tidak terpenuhinya fasilitas umum, padatnya daerah pemukiman dan timbulnya masalah sosial lainnya. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bima di dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi.

Pada dekade tujuh puluhan hampir setiap daerah menghadapi masalah yang sama yaitu besarnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta masalah tidak meratanya penduduk di setiap daerah. Terutama antara lain daerah pedesaan dan perkotaan. Masalah jumlah penduduk perlu diperhatikan karena penduduk sebagai sumber daya ekonomi, selain sebagai modal dasar pembangunan, juga merupakan objek bagi pembangunan.

Tabel. 3.1
Jumlah Penduduk Kota Bima Tiap Kecamatan Tahun 2015

NO	KELURAHAN/ KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	PARUGA	2.556	2.564	5.120
2	NAE	2.090	2.142	4.232
3	SARAE	2.440	2.538	4.978
4	TANJUNG	2.996	2.903	5.899
5	PANE	1.262	1.390	2.652



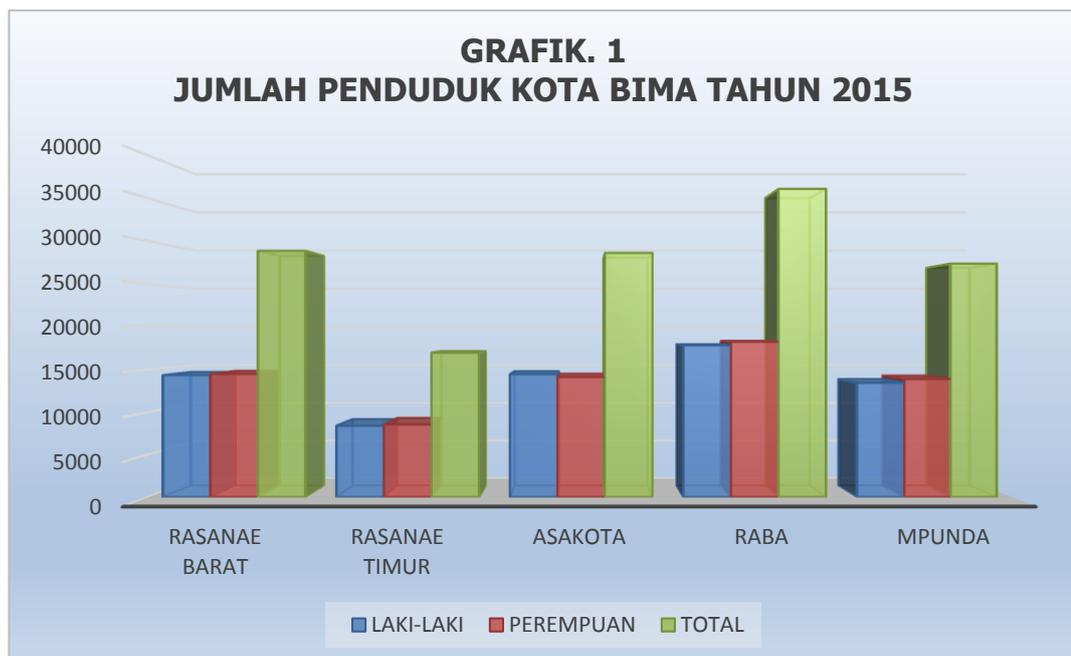
6	DARA	3.013	2.955	5.968
	RASANA E BARAT	14.357	14.492	28.849
1	KUMBE	2.649	2.684	5.333
2	LAMPE	694	738	1.432
3	DODU	1.432	1.477	2.909
4	NUNGA	1.044	1.035	2.079
5	KODO	972	1.011	1.983
6	OI FOO	797	768	1.565
7	LELAMASE	826	852	1.678
	RASANA E TIMUR	8.414	8.565	16.979
1	MELAYU	3.010	2.990	6.000
2	JATIWANGI	4.700	4.572	9.272
3	JATIBARU	4.345	4.219	8.564
4	KOLO	2.400	2.362	4.762
	ASAKOTA	14.455	14.143	28.598
1	PENARAGA	2.293	2.426	4.719
2	RONTU	1.418	1.418	2.836
3	PENANAE	1.909	1.906	3.815
4	KENDO	689	699	1.388
5	NTOBO	1.675	1.688	3.363
6	NITU	678	656	1.334
7	RABANGODU SELATAN	1.728	1.759	3.487
8	RABADOMPU TIMUR	1.733	1.810	3.543
9	RITE	1.068	1.030	2.098
10	RABADOMPU BARAT	2.335	2.523	4.858
11	RABANGODU UTARA	2.300	2.326	4.626
	RABA	17.826	18.241	36.067
1	MONGGONAO	1.969	1.989	3.958
2	SADIA	1.616	1.638	3.254
3	SANTI	1.004	1.081	2.085
4	SAMBINAE	1.217	1.198	2.415
5	PENATOI	1.938	2.110	4.048
6	LEWIRATO	863	826	1.689
7	MANDE	1.032	1.083	2.115
8	PANGGI	1.197	1.245	2.442
9	MANGGEMACI	1.583	1.640	3.223
10	MATAKANDO	1.039	1.090	2.129
	MPUNDA	13.458	13.900	27.358
	KOTA BIMA	68.510	69.341	137.851

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Jumlah penduduk 137.851 jiwa yang terdiri dari 68.510 laki-laki dan 69.341 perempuan. Penduduk Kota Bima tersebar di 5 (Lima) Kecamatan. Distribusi penduduk di tiap kelurahan dan kecamatan dapat di lihat pada tabel 3.1.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Raba mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 36.067 atau sekitar 26,16 %. Hal ini disebabkan karena wilayah kecamatan Raba merupakan daerah pusat pemerintahan. Pendetang yang datang dari berbagai daerah menetap di wilayah ini. Faktor tersebut menyebabkan penduduk terutama pendatang yang bekerja dibidang pemerintahan lebih memilih untuk bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Raba. Sebaliknya wilayah Kecamatan Rasanae Timur mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 16.979 jiwa atau 12,32%. Wilayah Kecamatan Rasanae Timur sebagian besar adalah wilayah pegunungan. Penduduk cenderung memilih lereng gunung sebagai tempat untuk menetap.

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin tiap Kecamatan lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Struktur umur penduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktifitas penduduk pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan analisis struktur umur penduduk akan berkaitan dengan banyaknya penduduk di usia produktif di suatu daerah. Penduduk usia produktif artinya penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan tidak



tergantung kepada orang lain. Penduduk usia produktif berkisar antara usia 15 - 64 tahun. Analisis struktur usia penduduk juga akan terkait dengan penyediaan angkatan kerja pada suatu daerah.

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah.

a) Umur Median (Median Age)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20 – 30 tahun;
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Tabel. 3.2
Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2015

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	KUMULATIF (fx)	% KUMULATIF
00-04	9.806	9.806	7,11
05-09	13.133	22.939	16,64
10-14	13.561	36.500	26,48
15-19	11.646	48.146	34,93
20-24	11.501	59.647	43,27
25-29	12.406	72.053	52,27
30-34	12.677	84.730	61,46
35-39	11.248	95.978	69,62
40-44	9.759	105.737	76,70
45-49	8.649	114.386	82,98
50-54	6.787	121.173	87,90
55-59	5.899	127.072	92,18
60-64	3.847	130.919	94,97
65-69	2.959	133.878	97,12
70-74	1.934	135.812	98,52
≥ 75	2.039	137.851	100
KOTA BIMA	137.851		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Untuk Kota Bima, berdasarkan data SIAK, umur median penduduk kota Bima pada tahun 2015 adalah 25 tahun, yang berarti bahwa setengah dari penduduk kota Bima pada tahun 2015 berusia di bawah 25 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 25 tahun. Umur median ini terletak diantara 20 – 30 tahun, sehingga penduduk kota Bima dikategorikan sebagai penduduk intermediate.

b) Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai Rasio Jenis Kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, rasio jenis kelamin juga berguna bagi para politisi terutama untuk mengetahui seberapa besar keterwakilan kaum perempuan di parlemen.

Tabel 3.3.

Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok umur Tahun 2015

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN
00-04	5.118	4.688	9.806	109,17
05-09	6.811	6.322	13.133	107,73
10-14	6.946	6.615	13.561	105,00
15-19	5.808	5.838	11.646	99,49
20-24	5.780	5.721	11.501	101,03
25-29	6.140	6.266	12.406	97,99
30-34	6.175	6.502	12.677	94,97
35-39	5.433	5.815	11.248	93,43
40-44	4.771	4.988	9.759	95,65
45-49	4.135	4.514	8.649	91,60
50-54	3.259	3.528	6.787	92,38
55-59	2.886	3.013	5.899	95,78
60-64	1.889	1.958	3.847	96,48
65-69	1.411	1.548	2.959	91,15
70-74	925	1.009	1.934	91,67



≥ 75	1.023	1.016	2.039	100,69
TOTAL	68.510	69.341	137.851	98,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Rasio di Kota Bima tahun 2015 sebesar 98,80 persen yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 - 99 penduduk laki-laki, ini menggambarkan penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk Perempuan.

c). Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafis. Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Melihat besarnya penduduk usia muda (kurang dari 15 tahun) yakni 20,39 persen atau mendekati seperempat jumlah penduduk Kota Bima, maka hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia.



Piramida Penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kota Bima saat ini didominasi penduduk usia non produktif (usia sekolah), terutama penduduk pada usia 10-14 tahun. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa kedepan nanti, penduduk Kota Bima sedang mengarah pada struktur penduduk tua. Terlihat pula bahwa penduduk berumur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida melebar. Ini berarti angka kelahiran cukup tinggi. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun terlihat lebih lebar dari kelompok umur dibawahnya, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang sangat kecil yaitu 5.03 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.



d). Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio).

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Menurut usia, rasio ketergantungan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua. Dari perhitungan rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua dapat diketahui kelompok umur mana yang berkontribusi paling besar atau sedikit dalam rasio ketergantungan total.

Penduduk kota Bima yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur, yaitu kelompok umur muda (0 – 14 tahun) sejumlah 36.500 jiwa, kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) sejumlah 94.419 Jiwa, dan kelompok umur tua (65 tahun keatas) sejumlah 6.932 jiwa.

Tabel 3.4
Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Produktif Tahun 2015

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
00-14 tahun (Umur Muda)	18.875	17.625	36.500	26,48
15-64 Tahun (Umur Produktif)	46.276	48.143	94.419	68,49
>65 Tahun (Umur Tua)	3.359	3.573	6.932	5,03
Jumlah	68.510	69.341	137.851	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan total sebesar 31,51 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 31-32 orang yang belum



produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 31,51 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (26,48%) dan rasio penduduk tua (5,03%).

3. Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari satu daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu wilayah.

Rasio kepadatan penduduk (*Population Density Ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

Tabel 3.5.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Bima Tahun 2015

NO	KELURAHAN/ KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN
1	PARUGA	5.120	0,91	5.626
2	NAE	4.232	0,31	13.652
3	SARAE	4.978	0,48	10.371
4	TANJUNG	5.899	0,79	7.467
5	PANE	2.652	0,31	8.555
6	DARA	5.968	7,34	813
RASANA E BARAT		28.849	10,14	2.845
1	KUMBE	5.333	1,52	3.509
2	LAMPE	1.432	7,23	198
3	DODU	2.909	7,93	367
4	NUNGGGA	2.079	11,59	179
5	KODO	1.983	5,55	357
6	OI FOO	1.565	9,2	170
7	LELAMASE	1.678	21,05	80
RASANA E TIMUR		16.979	64,07	265
1	MELAYU	6.000	0,76	7.895
2	JATIWANGI	9.272	22,18	418
3	JATIBARU	8.564	19,6	437
4	KOLO	4.762	26,49	180
ASAKOTA		28.598	69,03	414



1	PENARAGA	4.719	0,74	6.377
2	RONTU	2.836	4,74	598
3	PENANAE	3.815	5,34	714
4	KENDO	1.388	9,08	153
5	NTOBO	3.363	31,19	108
6	NITU	1.334	6,19	216
7	RABANGODU SELATAN	3.487	1,43	2.438
8	RABADOMPU TIMUR	3.543	0,54	6.561
9	RITE	2.098	1,84	1.140
10	RABADOMPU BARAT	4.858	1,66	2.927
11	RABANGODU UTARA	4.626	0,98	4.720
RABA		36.067	63,73	566
1	MONGGONAO	3.958	0,63	6.283
2	SADIA	3.254	0,68	4.785
3	SANTI	2.085	0,72	2.896
4	SAMBINAE	2.415	5,43	445
5	PENATOI	4.048	0,74	5.470
6	LEWIRATO	1.689	0,49	3.447
7	MANDE	2.115	0,69	3.065
8	PANGGI	2.442	3,51	696
9	MANGGEMACI	3.223	0,52	6.198
10	MATAKANDO	2.129	1,87	1.139
MPUNDA		27.358	15,28	1.790
KOTA BIMA		137.851	222,25	620

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari Tabel di atas diketahui Kota Bima mempunyai luas wilayah 222,25 Km² dan jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2015 sebanyak 137.851 jiwa maka kepadatan penduduk Kota Bima Tahun 2015 rata-rata 620 jiwa/ Km². Kecamatan dengan penduduk terpadat adalah kecamatan Rasanae Barat yaitu 2.845 jiwa/Km², sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Rasanae Timur yaitu sebesar 265 jiwa/Km².

Melihat tingkat kepadatan Kota Bima, terjadi ketimpangan persebaran penduduk yang sangat besar antara Kecamatan. Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda merupakan pusat pemukiman penduduk, pemerintah, perdagangan, pendidikan dan kegiatan lainnya dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu luas wilayah dua kecamatan tersebut lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya.



B. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KARAKTERISTIK SOSIAL

1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan kelas atau jenjang tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Gambaran tentang kualitas penduduk Kota Bima menurut pendidikan berdasarkan Database SIAK status 31 Desember 2015 adalah sebagaimana Tabel 3.6. berikut:

Tabel 3.6.
Penduduk Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir
Tahun 2015

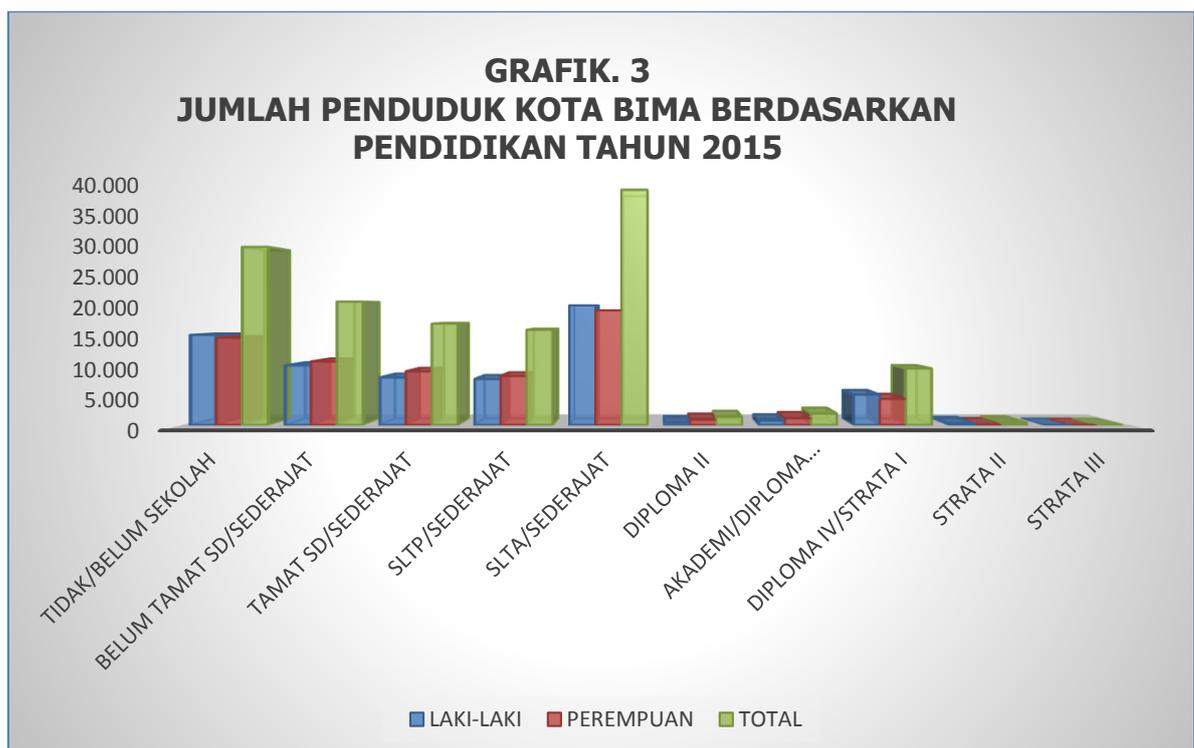
TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tidak/Belum Sekolah	15.323	50,76	14.864	49,24	30.187	21,90
Belum Tamat SD/Sederajat	10.152	48,41	10.818	51,59	20.970	15,21
Tamat SD/Sederajat	8.096	46,98	9.138	53,02	17.234	12,50
SLTP/Sederajat	7.838	48,43	8.345	51,57	16.183	11,74
SLTA/Sederajat	20.327	51,05	19.491	48,95	39.818	28,88
Diploma II	484	34,47	920	65,53	1.404	1,02
Akademi/Diploma III/SARMUD	789	39,99	1.184	60,01	1.973	1,43
Diploma IV/Strata I	5.169	53,66	4.464	46,34	9.633	6,99
Strata II	322	73,52	116	26,48	438	0,32
Strata III	10	90,91	1	9,09	11	0,01
Jumlah	68.510	49,70	69.341	50,30	137.851	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari tabel terlihat bahwa penduduk Kota Bima 28,88 persen berpendidikan SLTA/Sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan Diploma II dan Akademi/D-III/Sarjana Muda penduduk perempuan lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki.

Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, persentase yang menamatkan lebih rendah untuk perempuan dibandingkan untuk laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Kota Bima.

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk kota Bima mayoritas adalah SLTA/Sederajat. Sedangkan untuk pendidikan tinggi Strata III, penduduk kota Bima masih sangat sedikit.



2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila : "Ketuhanan Yang Maha Esa".



Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, Ekonomi dan budaya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

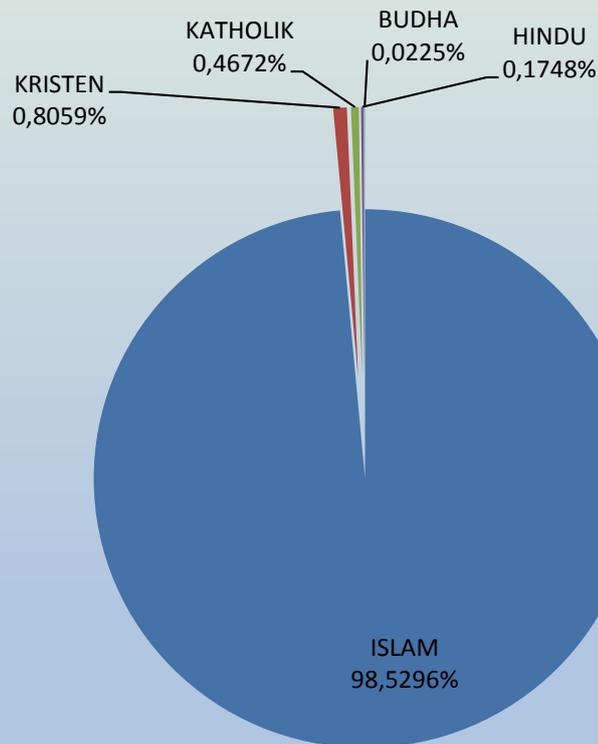
Tabel. 3.7.
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HUCHU	JUMLAH
RASANA E BARAT	27.841	634	300	47	27		28.849
RASANA E TIMUR	16.969	8	-	2	-	-	16.979
ASAKOTA	28.164	199	144	88	3	-	28.598
RABA	35.720	150	127	70	-	-	36.067
MPUNDA	27.130	120	73	34	1	-	27.358
KOTA BIMA	135.824	1.111	644	241	31	-	137.851

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Bima 135.824 jiwa menganut agama islam dan ini menunjukkan bahwa kota Bima didominasi oleh penduduk yang beragama islam. Agama kedua terbesar setelah agama islam yang tersebar di setiap wilayah administrasi Kota Bima adalah agama kristen yakni 1.111 jiwa, agama Khatolik 644 jiwa, agama Hindu 241 jiwa dan agama budha 31 jiwa. Dengan beragamnya agama merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bima untuk membina masyarakat didalam menyerukan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya, mempunyai rasa aman dan tentram dalam menjalankan ibadah.

GRAFIK. 4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KOTA BIMA
TAHUN 2015



Data tersebut juga dapat disajikan dalam bentuk diagram seperti di atas. Dari kedua penyajian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk kota Bima beragama Islam yaitu sebanyak 95,5296 %, dan paling sedikit adalah agama Budha sebanyak 31 jiwa atau 0,0225%.

3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.



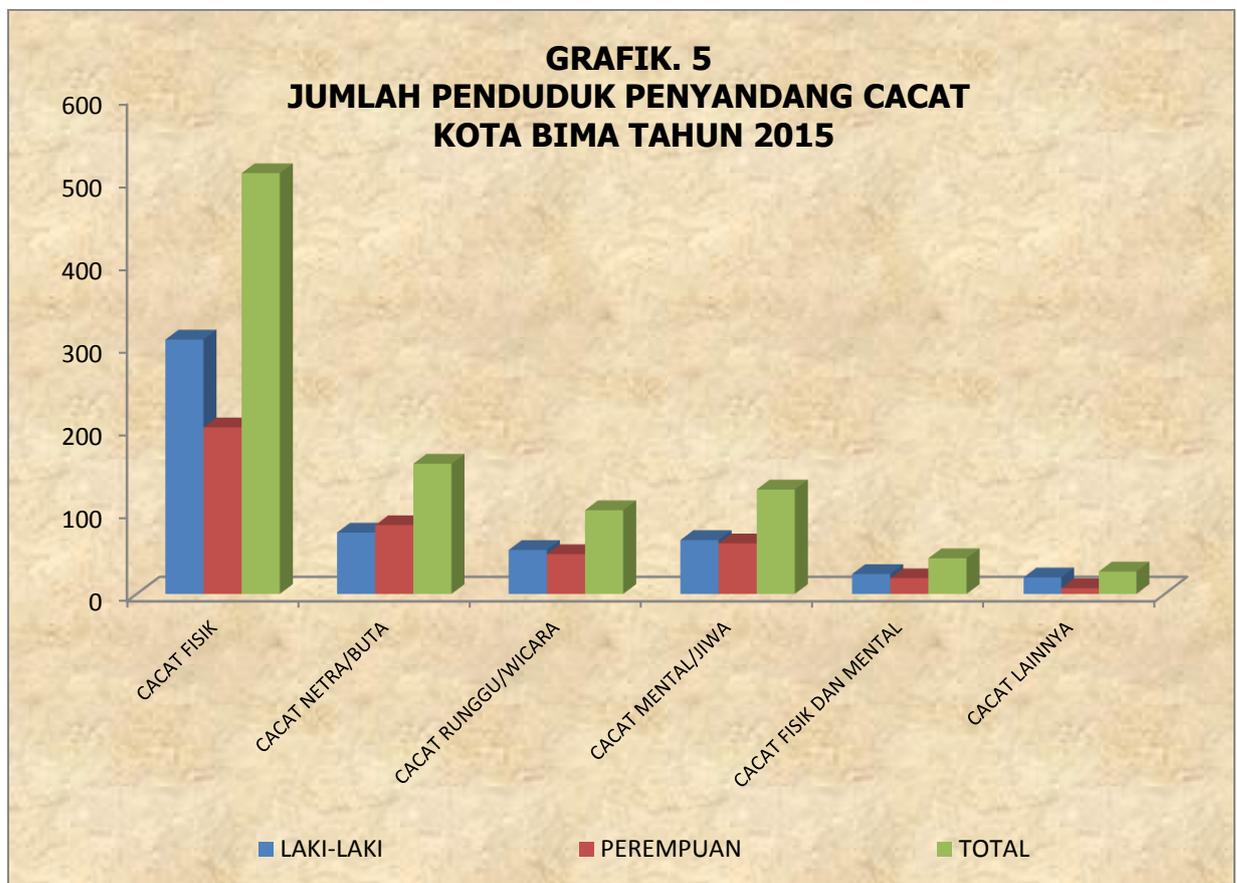
Tabel .3.8.

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

JENIS KECACATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
CACAT FISIK	307	56,54	201	47,97	508	52,81
CACAT NETRA/BUTA	74	13,63	83	19,81	157	16,32
CACAT RUNGGU/WICARA	53	9,76	48	11,46	101	10,50
CACAT MENTAL/JIWA	65	11,97	61	14,56	126	13,10
CACAT FISIK DAN MENTAL	24	4,42	19	4,53	43	4,47
CACAT LAINNYA	20	3,68	7	1,67	27	2,81
JUMLAH	543	100	419	100	962	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk penyandang cacat di Kota Bima adalah sebanyak 962 jiwa. Penyandang cacat terbanyak adalah cacat fisik yaitu sebanyak 508 jiwa. Sedangkan penyandang cacat paling sedikit adalah cacat lainnya yaitu sebanyak 27 jiwa. Data tersebut dapat disajikan juga dalam bentuk grafik seperti di bawah ini.





Informasi tentang jumlah penyandang cacat dapat digunakan pemerintah Kota Bima untuk memberikan fasilitas kepada para penyandang cacat agar bisa melakukan aktifitas yang sama dengan penduduk lainnya. Contohnya adalah pendirian Sekolah Luar Biasa jika masih berada pada usia sekolah dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi penyandang cacat usia produktif. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan *kategori khusus*.

4. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam pengembangan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana /pembangunan keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidak siapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah, dengan proporsi kawin yang tinggi akan menaikkan tingkat kelahiran.



Tabel 3.9.
Jumlah penduduk menurut status kawin Tahun 2015

KECAMATAN	STATUS KAWIN								JUMLAH
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
LAKI-LAKI (L)									
RASANA BARAT	7.900	55,03	6.211	43,26	98	0,68	148	1,03	14.357
RASANA TIMUR	4.131	49,10	4.106	48,80	35	0,42	142	1,69	8.414
ASAKOTA	7.739	53,54	6.508	45,02	73	0,51	135	0,93	14.455
RABA	9.094	51,02	8.388	47,05	105	0,59	239	1,34	17.826
MPUNDA	7.084	52,64	6.220	46,22	58	0,43	96	0,71	13.458
KOTA BIMA	35.948	52,47	31.433	45,88	369	0,54	760	1,11	68.510
PEREMPUAN (P)									
RASANA BARAT	6.995	48,27	6.449	44,50	277	1,91	771	5,32	14.492
RASANA TIMUR	3.795	44,31	4250	49,62	103	1,20	417	4,87	8.565
ASAKOTA	6.771	47,88	6.679	47,22	182	1,29	511	3,61	14.143
RABA	8.313	45,57	8.716	47,78	276	1,51	936	5,13	18.241
MPUNDA	6695	48,17	6469	46,54	211	1,52	525	3,78	13.900
KOTA BIMA	32.569	46,97	32.563	46,96	1.049	1,51	3.160	4,56	69.341
L + P									
RASANA BARAT	14.895	51,63	12.660	43,88	375	1,30	919	3,19	28.849
RASANA TIMUR	7.926	46,68	8.356	49,21	138	0,81	559	3,29	16.979
ASAKOTA	14.510	50,74	13.187	46,11	255	0,89	646	2,26	28.598
RABA	17.407	48,26	17.104	47,42	381	1,06	1.175	3,26	36.067
MPUNDA	13.779	50,37	12.689	46,38	269	0,98	621	2,27	27.358
KOTA BIMA	68.517	49,70	63.996	46,42	1.418	1,03	3.920	2,84	137.851

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa banyaknya penduduk belum kawin adalah 68.517 jiwa. Ini berarti bahwa hampir setengah jumlah penduduk Kota Bima masih belum kawin. Jika dilihat pada Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok umur maka penduduk usia di bawah 40 tahun mencapai 69,62%. Jadi untuk 5 – 10 tahun kedepan Kota Bima diperkirakan akan mempunyai angka pertumbuhan penduduk yang tinggi.



a. Angka Perkawinan Kasar (APK)

Perkawinan merupakan variable antara yang mempengaruhi fertilitas, antara lain melalui panjang dan pendeknya usia subur yang dilalui pasangan usia subur (PUS).

Angka perkawinan kasar menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan suatu tahun tertentu. Meskipun angka ini masih kasar tetapi dapat menunjukkan kondisi besaran penduduk yang kawin di wilayah tertentu. Selain itu walaupun indikator ini masih kasar namun dapat dijadikan dasar mengembangkan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan keluarga dan rumah tangga, dan lain-lain.

Jumlah penduduk awal tahun 2015 sebesar 137.176 jiwa dan penduduk pertengahan tahun 2015 Kota Bima sebesar 137.284 jiwa sedangkan penduduk yang kawin di Kota Bima Tahun 2015 tercatat sebesar 2.190 jiwa dengan demikian angka perkawinan kasar di Kota Bima adalah 1.59 jiwa artinya bahwa dari 1000 penduduk Kota Bima pada tahun 2015 terdapat 1-2 jiwa penduduk yang berstatus kawin atau sebanyak 1-2 kali terjadi peristiwa perkawinan.

b. Angka Perkawinan Umum (AKU)

Angka Perkawinan Umum (AKU) merupakan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka perkawinan umum sedikit lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar, karena faktor pembagiannya adalah penduduk dalam '**usia kawin**' atau beresiko kawin atau penduduk usia 15 tahun ke atas.

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Kota Bima tahun 2015 sebesar 101.351 jiwa dan jumlah penduduk berstatus kawin di Kota Bima tahun 2.190 jiwa. Dengan demikian angka perkawinan umum di Kota Bima adalah 2,16 artinya bahwa dari 1000 penduduk Kota Bima tahun 2015 terdapat 2 penduduk



yang berstatus kawin, hal ini menunjukkan gejala bahwa masih adanya perkawin usia muda.

Tabel.3.10.

Angka Perkawinan Umum menurut Kecamatan Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERSTATUS KAWIN	PENDUDUK USIA 15 TH +	AKU
RASANAЕ BARAT	382	21.217	1,80
RASANAЕ TIMUR	337	12.699	2,65
ASAKOTA	624	20.567	3,03
RABA	658	26.971	2,44
MPUNDA	189	19.897	0,95
KOTA BIMA	2.190	101.351	2,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari Tabel 3.10. terlihat bahwa Angka Perkawinan Umum tertinggi di Kecamatan Asakota yaitu 3,03 disusul Kecamatan Rasanae Timur dengan Angka Perkawinan umum yaitu 2.65 Kecamatan Raba dengan Angka Perkawinan Umum 2,44 Kecamatan Rसानae Barat dengan Angka Perkawinan Umum 1,80 dan yang terkecil adalah Kecamatan Mpunda dengan Angka Perkawinan Umum yaitu 0,95.

c. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.



Tabel.3.11.

Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH STATUS KAWIN USIA 15-19 TAHUN		PENDUDUK USIA 15-19 TAHUN		ANGKA PERKAWINAN KELOMPOK UMUR	
	LAKI	PEREMPUAN	LAKI	PEREMPUAN	LAKI	PEREMPUAN
RASANA E BARAT	9	46	1.184	1.247	7,60	36,89
RASANA E TIMUR	10	59	748	728	13,37	81,04
ASAKOTA	11	79	1.314	1.239	8,37	63,76
RABA	19	71	1.482	1.539	12,82	46,13
MPUNDA	25	20	1.080	1.085	23,15	18,43
KOTA BIMA	74	275	5808	5838	12,74	47,11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap 1000 orang penduduk laki-laki yang berumur 15-19 tahun terdapat 12-13 orang yang berstatus kawin, begitu pula dengan penduduk perempuan, dari 1000 orang penduduk perempuan yang berumur 15-19 tahun terdapat 47 yang berstatus kawin.

d. Angka Perceraian Kasar (Divorce)

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh sepasang suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari sesuatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.



Jumlah penduduk pertengahan tahun Kota Bima tahun 2015 sebesar 137.284 jiwa dan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup di Kota Bima pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.418 jiwa. Dengan demikian angka perceraian kasar di Kota Bima adalah 10,33 artinya bahwa dari 1000 penduduk Kota Bima pada tahun 2015 terdapat 10 penduduk yang berstatus cerai hidup.

Tabel. 3.12.

Angka Perceraian Kasar menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN	APK
RASANAЕ BARAT	375	28.976	12,94
RASANAЕ TIMUR	138	16.858	8,19
ASAKOTA	255	28.477	8,95
RABA	381	35.994	10,59
MPUNDA	269	26.979	9,97
KOTA BIMA	1.418	137.284	10,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

e. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum (APU) menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas atau penduduk yang terkena resiko perceraian atau disebut juga penduduk berumur *divorceable* pada suatu tahun tertentu.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Bima tahun 2015 sebesar 102.156 jiwa dan jumlah penduduk berstatus cerai hidup di Kota Bima pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 1.418 jiwa. Dengan demikian angka perceraian umum di Kota Bima adalah 13,88 artinya bahwa dari 1000 penduduk Kota Bima pada tahun 2015 terdapat 13 sampai 14 orang penduduk yang berstatus cerai hidup.

Dari Tabel 3.13 terlihat bahwa Angka Perceraian Umum tertinggi di Kecamatan Rasanae Barat yaitu 17,26 disusul Kecamatan Raba yaitu 14,13, Kecamatan Mpunda 13,52, Kecamatan Asakota yaitu 12,40 dan yang terkecil adalah Kecamatan Rasanae Timur dengan angka perceraian umum 10,62.



Tabel 3.13.

Angka Perceraian Umum menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK USIA 15 TH +	APU
RASANA E BARAT	375	21.722	17,26
RASANA E TIMUR	138	12.999	10,62
ASAKOTA	255	20.567	12,40
RABA	381	26.971	14,13
MPUNDA	269	19.897	13,52
KOTA BIMA	1.418	102.156	13,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

C. KELUARGA

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu inti/batih (*nuclear Family*) dan keluarga luas (*Extended Family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Pada saat sekarang ini sudah muncul adanya keluarga yang terdiri dari tiga generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu, dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches Family*, dimana pasangan suami istri harus



menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bias berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahtraannya.

Tabel. 3.14.

Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
RASANAЕ BARAT	28.849	8.407	3,43
RASANAЕ TIMUR	16.979	5.190	3,27
ASAKOTA	28.598	8.135	3,52
RABA	36.067	10.854	3,32
MPUNDA	27.358	8.075	3,39
KOTA BIMA	137.851	40.661	3,39

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Jumlah keluarga di Kota Bima sebanyak 40.661 keluarga yang tersebar di 5 wilayah Kecamatan. Kecamatan Raba memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 10.854 keluarga kemudian disusul oleh Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 8.407 keluarga, Kecamatan Asakota sebanyak 8.135 keluarga, Kecamatan Mpunda sebanyak 8,075 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur yaitu 5,190 keluarga.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Bima sebanyak 3,39 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Bima lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut wilayah Kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan terdiri dari 3 – 4 orang per keluarga.



Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kota Bima dan dapat digunakan pemerintah kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

2. Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Dari Tabel. 3.15. nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 37.076 kepala keluarga laki-laki (45,34%) yang mempunyai isteri sebanyak 34.393 orang (42,17%), sedangkan dari 5.615 kepala keluarga perempuan (6,88%) hanya 5 orang (0,01%) saja yang bersuami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Tabel. 3.15.

Jumlah Penduduk berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Kota Bima Tahun 2015

STATUS HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Kepala Keluarga	32.130	46,90	6.498	9,37	38.628	28,02156
Suami	4	0,01	0	0,00	4	0,002902
Istri	0	0,00	28.952	41,75	28.952	21,00239
Anak	34.038	49,68	30.974	44,67	65.012	47,16107
Menantu	12	0,02	17	0,02	29	0,021037
Cucu	664	0,97	622	0,90	1.286	0,932891
Orang Tua	82	0,12	360	0,52	442	0,320636



Mertua	51	0,07	218	0,31	269	0,195138
Famili Lain	1.470	2,15	1.616	2,33	3.086	2,238649
Pembantu	5	0,01	13	0,02	18	0,013058
Lainnya	54	0,08	71	0,10	125	0,090678
Jumlah	68.510	49,70	69.341	50,30	137.851	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 3,81 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kota Bima jumlahnya tidak besar. Namun demikian, perlu diperhatikan adalah keluarga yang dikepalai oleh laki-laki, jumlahnya lebih besar dibandingkan yang dikepalai oleh perempuan.

3. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, umur, staus kawin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 3.16.

Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
RASANA E BARAT	6.426	20,00	1.492	22,96	7.918	20,50
RASANA E TIMUR	4.177	13,00	754	11,60	4.931	12,77
ASAKOTA	6.619	20,60	1.143	17,59	7.762	20,09
RABA	8.564	26,65	1.823	28,05	10.387	26,89
MPUNDA	6.344	19,74	1286	19,79	7.630	19,75
KOTA BIMA	32.130	83,18	6.498	16,82	38.628	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Tabel 3.16 menyajikan jumlah dan proporsi kepala keluarga Kota Bima tahun 2015 menurut wilayah Kecamatan dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Bima adalah laki-laki yaitu



32.130 kepala keluarga (83,18 %), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 6,498 (16,82 %) atau dengan perbandingannya sekitar 8:2, yang artinya dari 8 kepala keluarga laki-laki terdapat 2 kepala keluarga perempuan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain. Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Selain itu, penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern yakni perempuan yang hidup melajang (tidak/belum kawin).

4. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, social maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 3.17.

Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Kawin di Kota Bima Tahun 2015

STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
BELUM KAWIN	469	1,46	432	6,65	901	2,33
KAWIN	30.707	95,57	2.605	40,09	33.312	86,24
CERAI HIDUP	312	0,97	878	13,51	1.190	3,08



CERAI MATI	642	2,00	2.583	39,75	3.225	8,35
JUMLAH	32.130	83,18	6.498	16,82	38.628	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari tabel di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kota Bima pada tahun 2015 berstatus kawin yakni 86,24 persen, dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 2,33 persen. Selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 16,43 persen.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki yakni 83,18 persen. Sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yakni 16,82 persen. Selanjutnya dari tabel tersebut terlihat bahwa presentase kepala keluarga laki-laki yang berstatus belum kawin (lajang) persentasenya lebih rendah yakni 1,46 persen dari pada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang yakni 6,65 persen.

Bila diperhatikan lebih lanjut, kepala keluarga laki-laki berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) persentasenya lebih rendah yakni 2,97 persen dari pada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai yakni 53,26 persen.

5. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status social dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas social maupun ekonomi keluarga.

Tabel 3.18.
Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2015

PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	1261	3,92	578	8,90	1.839	4,76
Belum Tamat SD/Sederajat	2.078	6,47	822	12,65	2.900	7,51
Tamat SD/Sederajat	5.226	16,27	1412	21,73	6.638	17,18
SLTP/Sederajat	4.123	12,83	905	13,93	5.028	13,02
SLTA/Sederajat	13.602	42,33	2111	32,49	15.713	40,68
Diploma II	421	1,31	119	1,83	540	1,40
Akademi/Diploma III/SARMUD	654	2,04	111	1,71	765	1,98
Diploma IV/Strata I	4.457	13,87	421	6,48	4.878	12,63
Strata II	298	0,93	19	0,29	317	0,82
Strata III	10	0,03	0	0,00	10	0,03
JUMLAH	32.130	100	6.498	100	38.628	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 40,68 persen, disusul dengan tamat SD/ sederajat sebesar 17,18 persen dan SLTP/ sederajat sebesar 13,02 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 3,38 persen dan S1/S2/S3 sebesar 13,47 persen . Keluarga yang tidak sekolah yang persentasenya mencapai 4,76 persen. Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

6. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut

status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 3.19.
Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Bekerja di Kota Bima Tahun 2015

STATUS BEKERJA	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Bekerja	29.572	92,04	1447	22,27	31.019	80,30
Belum/tidak bekerja	1.420	4,42	417	6,42	1.837	4,76
Pelajar/mahasiswa	130	0,40	54	0,83	184	0,48
Pensiun	1.008	3,14	91	1,40	1.099	2,85
Mengurus Rumah Tangga	0	0	4.489	69,08	4.489	11,62
Jumlah	32.130	86,85	6.498	13,15	38.628	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dilihat dari kegiatan ekonomi, bahwa 80,30 persen kepala keluarga di Kota Bima bekerja. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan kepala keluarga perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas. Sementara itu, sekitar 4,75 persen kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bima berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase mereka kecil, sehingga pemerintah Kota Bima perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Selanjutnya tabel di atas juga menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga yaitu 11,62 persen. Selanjutnya dari tabel tersebut, terlihat adanya kepala keluarga yang sudah pensiun.

D. KELAHIRAN (FERTILITAS)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas mencakup peranan



kelahiran pada perubahan penduduk. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran *hidup (live birth)*, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Seorang perempuan yang secara biologis subur (*fecund*) tidak selalu melahirkan anak-anak yang banyak, misalnya dia mengatur fertilitas dengan abstinensi atau menggunakan alat-alat kontrasepsi. Kemampuan biologis seorang perempuan untuk melahirkan sangat sulit untuk diukur. Ahli demografi hanya menggunakan pengukuran terhadap kelahiran hidup (*live birth*).

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Disamping itu seorang yang meninggal pada hari dan waktu tertentu, berarti mulai saat itu orang tersebut tidak mempunyai resiko kematian lagi. Sebaliknya seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti resiko melahirkan dari perempuan tersebut menurun. Memperhatikan kompleksnya pengukuran terhadap fertilitas tersebut, maka memungkinkan pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan dengan dua macam pendekatan : pertama, Pengukuran Fertilitas Tahunan (*Yearly Performance*) yakni Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*), Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*), Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), dan kedua, Pengukuran Fertilitas Kumulatif (*Reproductive History*) yakni jumlah anak yang pernah dilahirkan (*Children Ever Born/CEB*) dan jumlah anak dan wanita (*Child Woman Ratio/CWR*).

Disamping itu, kelahiran juga merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun



perencana dalam menyusun program-program pembangunan social terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu. Anak dan pembangunan keluarga.

1. Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Jumlah kelahiran hidup yang dilaporkan oleh penduduk dan selanjutnya diterbitkan Nomor Induk Penduduk (NIK) Kota Bima selama tahun 2015 adalah 993 jiwa, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin dan Kecamatan sebagaimana Tabel 3.24.

Tabel 3.20.
Jumlah Kelahiran Hidup Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan, Tahun 2015

Kecamatan	Kelahiran	
	n	%
RasanaE Barat	800	23,09
RasanaE Timur	338	9,76
Asakota	719	20,76
Raba	823	23,76
Mpunda	784	22,63
Kota Bima	3.464	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, diolah

Tabel 3.20 menunjukkan Kecamatan Raba merupakan wilayah dengan Jumlah kelahiran hidup terbesar yakni 823 jiwa (23,76%), diikuti Kecamatan Rasanae Barat yakni 800 jiwa (23,09 %), dan Kecamatan Mpunda yakni 784 jiwa (22,63 %), diikuti Kecamatan Asakota yakni 719 jiwa (20,76 %) sedangkan



Kecamatan Rasanae Timur merupakan wilayah dengan jumlah kelahiran terkecil yakni 338 jiwa (9,76%).

Jumlah kelahiran hidup menurut Kecamatan dan jenis kelamin dapat digambarkan pula dalam bentuk Grafik, sebagaimana terlihat dibawah ini



2. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)

Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak dan orang tua). Angka Kelahiran Kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Berdasarkan Tabel 3.21, Angka Kelahiran Kasar di Kota Bima sebesar 25,23 artinya dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 25 kelahiran hidup.



Tabel 3.21.
Angka Kelahiran Kasar Berdasarkan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN	ANGKA KELAHIRAN KASAR
RASANA E BARAT	800	28.976	27,61
RASANA E TIMUR	338	16.858	20,05
ASAKOTA	719	28.477	25,25
RABA	823	35.994	22,86
MPUNDA	784	26.979	29,06
KOTA BIMA	3.464	137.284	25,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah
Dikes Kota Bima, diolah

Tabel diatas menunjukkan Angka Kelahiran Kasar Kota Bima berdasarkan kecamatan. Terlihat bahwa angka Kelahiran Kasar tertinggi yakni Kecamatan Mpunda sebesar 29,06 artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 29 kelahiran hidup. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan terendah angka kelahiran kasar yakni sebesar 20,05 artinya dari 1.000 penduduk pertengahan tahun terjadi 20 kelahiran hidup.

E. KEMATIAN (MORTALITAS)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari tiga komponen demografi selain fertilitas dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kematian dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan dan dimana saja. Kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk disuatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk disuatu daerah.



Informasi mengenai kematian sangatlah penting, tidak hanya bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk pemberantasan kemiskinan. Selain itu data kesehatan juga berfungsi untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Ukuran dasar mortalitas dinyatakan dalam "angka" (*rate* yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kematian di suatu daerah. Sedangkan indikator kematian dari sisi kuantitas antara lain :

1. Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/ mortalitas lainnya. Jumlah kematian penduduk Kota Bima berdasarkan registrasi penduduk pada tahun 2014 adalah 393 Jiwa, yang terdiri dari 205 jiwa laki-laki dan 188 jiwa perempuan.

Tabel 3.22.
Jumlah Kematian Menurut Wilayah Kecamatan dan Jenis kelamin Kota Bima Tahun 2015

Kecamatan	Kematian			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Rasanae Barat	67	59	126	20,45
Rasanae Timur	44	56	100	16,23
Asakota	63	55	118	19,16
Raba	79	100	179	29,06
Mpunda	42	51	93	15,10
Kota Bima	295	321	616	100
% Baris	47,89	52,11	100,00	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah



Tabel 3.22 menunjukkan bahwa, Perempuan lebih rentan terhadap kematian, hal ini terlihat dari 616 kematian, sebesar 52,11 persen adalah perempuan dan 47,89 persen adalah laki-laki. Jika dilihat menurut wilayah Kecamatan, jumlah kematian tertinggi di Wilayah Kecamatan Raba yakni 179 jiwa (29,06%), diikuti wilayah Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 126 jiwa (20,46%), Wilayah Kecamatan Asakota yakni 118 jiwa (19,16%), Wilayah Rasanae Timur sebanyak 100 jiwa (16,23%), dan jumlah kematian terendah adalah Wilayah Kecamatan Mpunda yakni 93 jiwa (15,10 %).

2. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Angka Kematian Kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.

Tabel 3.23.
Angka Kematian Kasar Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN	ANGKA KEMATIAN KASAR
Rasanae Barat	126	28.976	4,35
Rasanae Timur	100	16.858	5,93
Asakota	118	28.477	4,14
Raba	179	35.994	4,97
Mpunda	93	26.979	3,45
Jumlah	616	137.284	4,49

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Pada tabel 3.23 terlihat bahwa angka kematian kasar (CDR) Kota Bima pada Tahun 2015 sebesar 4,49. Artinya dari setiap 1.000 penduduk terjadi 4 orang meninggal. Jika diperhatikan menurut wilayah Kecamatan, angka kematian kasar tertinggi di wilayah Kecamatan Rasanae Timur, diikuti Kecamatan Raba, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota. Angka



Kematian terendah di Kecamatan Mpunda yakni 3,45 atau dari 1.000 penduduk terdapat 3 orang meninggal dunia.



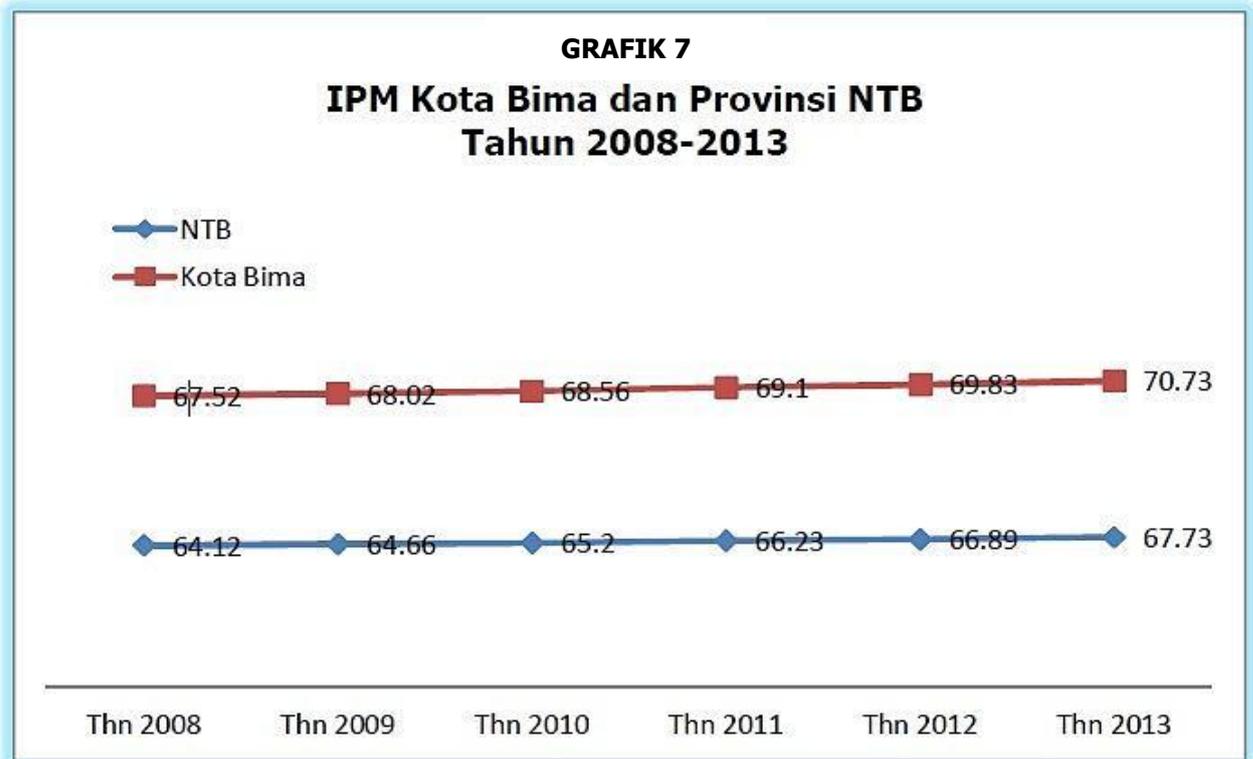
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tingkat pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir), serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita.

Selama periode 2008 – 2013, pembangunan manusia di Kota Bima secara umum terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008 angka IPM Kota Bima mencapai angka 67,52. Angka ini lebih tinggi dibanding angka IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 64,12. Begitu juga dengan capaian angka IPM tahun 2013 sebesar 70,73 dan lebih tinggi dari angka IPM Provinsi NTB sebesar 67,73. Bahkan dalam jajaran Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, nilai IPM Kota Bima menempati peringkat kedua setelah Kota Mataram.

Perkembangan IPM Kota Bima sebagaimana yang tergambar pada grafik. 4.1. terus menunjukkan peningkatan capaian. Tahun 2008, capaian IPM Kota Bima sebesar 67,52, tahun 2009 angka tersebut naik menjadi 68,02 dan 68,58 pada tahun 2010. Tahun 2011 hingga 2013 capaian IPM terus bergerak naik secara stabil sampai mencapai 70,73 pada tahun 2013.

Pergerakan nilai IPM Provinsi NTB tidak jauh berbeda dengan pergerakan nilai IPM Kota Bima, hanya saja pergerakan yang relatif drastis untuk nilai IPM NTB terjadi pada periode 2010-2011, sedangkan pergerakan pada periode lainnya tergolong biasa. Untuk jelasnya mengenai besaran IPM Kota Bima dan Provinsi NTB selama periode 2008-2013 dapat dilihat pada grafik 7.



Pada periode 2011-2012 IPM Kota Bima menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari peningkatan komponen IPM seperti indikator harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Peningkatan komponen IPM Kota Bima selama Tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut rata-rata lama sekolah naik menjadi 5,27 persen poin, pengeluar riil per kapita naik sebesar 0,58 persen poin. Sedangkan angka harapan hidup mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen point dan 0,03 persen poin untuk angka melek huruf.

Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi, antara lain, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya taraf kesehatan sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakatnya.



A. Kesehatan

1. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas adalah istilah yang digunakan untuk mengindikasikan banyaknya anak yang lahir hidup. Jadi fertilitas mengukur kemampuan reproduksi perempuan yang diperkirakan dengan menggunakan angka kelahiran hidup. Banyaknya kelahiran yang muncul pada tahun tertentu dalam suatu populasi ditentukan oleh faktor-faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, banyaknya perkawinan, lamanya perkawinan, dan banyaknya anak yang lahir. Selain itu, banyaknya kelahiran juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, misalnya kondisi rumah, pendidikan, pendapatan, agama, dan pandangan mengenai ukuran keluarga.

a. Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, dengan demikian tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok Umur (ASFR) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 100 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama.

Tabel 4.1.

Angka Kelahiran Menurut Kelompok umur Tahun 2015

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ANGKA KELAHIRAN MENURUT UMUR (ASFR)
15-19	5.838	447	8
20-24	5.721	688	12
25-29	6.266	842	13
30-34	6.502	586	9
35-39	5.815	353	6
40-44	4.988	336	7
45-49	4.514	211	5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah



Tabel 4.1 di atas menunjukkan Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Kota Bima Tahun 2015. ASFR terendah pada kelompok umur 15-49 dan tertinggi pada kelompok umur 25-29 tahun, artinya bahwa dari 100 perempuan berumur 25-29 tahun terjadi 13 kelahiran hidup.

b. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun).

Informasi Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) berguna untuk mengambil keputusan dan perencanaan dalam merencanakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas diketahui bahwa Angka Kelahiran Total di Kota Bima pada setiap perempuan akan melahirkan anak sebanyak 2-3 anak sampai akhir masa reproduksinya (15-49 Tahun).

c. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio Anak-Ibu (*CWR*) merupakan indikator fertilitas yang cukup sederhana. Semakin rendah CWR mengindikasikan semakin rendah tingkat fertilitas di suatu wilayah. Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu. Selain itu, Rasio ini juga berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.



Tabel 4.2.
Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR) Kota Bima
Tahun 2015

KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN	PENDUDUK PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CWR)
RASANAЕ BARAT	2.037	16.420	12,41
RASANAЕ TIMUR	1.133	9.508	11,92
ASAKOTA	2.019	16.561	12,19
RABA	2.590	20.175	12,84
MPUNDA	2.027	15.222	13,32
KOTA BIMA	9.806	77.886	12,59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Tahun 2015 di Kota Bima terdapat 8-9 anak balita (0-4 tahun) pada setiap 100 perempuan usia reproduktif. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 12-13 balita. Wilayah Kecamatan Raba dan Kecamatan Mpunda merupakan wilayah dengan rasio jumlah anak terhadap perempuan usia reproduktif (CWR) tertinggi yakni terdapat 13 balita pada setiap 100 perempuan usia produktif. Sedangkan rasio jumlah anak terhadap jumlah perempuan (CWR) terendah di Wilayah Kecamatan Rasanae barat, Rasanae Timur dan asakota terdapat 12 balita pada setiap 100 perempuan usia produktif.

2. Mortalitas (Kematian)

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan dibidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dll. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan, maupun penyebab yang lain.



Penyakit dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degenerative, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian.

Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistim pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan kematian anak-anak

a. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Kematian bayi sebelum 1 bulan (neonatal) umumnya berhubungan dengan kondisi sewaktu kehamilan/kelahiran seperti kelahiran pre-term, berat badan lahir rendah, infeksi, *asphyxia*, dan neo-natal tetanus.

Sedangkan kematian lepas baru lahir (post neo-natal) umumnya penyebab kematian post neo-natal di negara-negara berkembang adalah diare dan pneumonia dan upaya preventif mengurangi kematian post-neonatal adalah melalui peningkatan gizi dan pemberian ASI selain vaksinasi/imunisasi lengkap.

Berikut ini adalah Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Bima.

Tabel 4.3
Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2015

Kecamatan	Kelahiran hidup		Kematian bayi		AKB/IMR
	Σ	%	Σ	%	
RasanaE Barat	800	23,09%	3	17,65%	3,75
RasanaE Timur	338	9,76%	4	23,53%	11,83
Asakota	719	20,76%	6	35,29%	8,34
Raba	823	23,76%	3	17,65%	3,65
Mpunda	784	22,63%	1	5,88%	1,28
Kota Bima	3.464	100,00%	17	100,00%	4,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima, diolah



Dari tabel 4.3 terlihat bahwa Angka kematian bayi di Kota Bima sebesar 4,91 artinya dari 1000 kelahiran hidup di Kota Bima terjadi sebanyak 4-5 kematian bayi, dan Kecamatan Rasanae Timur merupakan wilayah dengan angka kematian bayi tertinggi yaitu 11,83 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan Kecamatan Mpunda memiliki angka kematian terendah yakni 1,28/1000 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 1000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, misalnya seperti kecelakaan atau terjatuh, dan lain-lain.

Tabel 4.4.
Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate-MMR) Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian ibu				AKI/MMR
		Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
RasanaE Barat	800	0	0	2	2	2,50
RasanaE Timur	338	0	0	0	0	0,00
Asakota	719	0	0	1	1	1,39
Raba	823	0	0	0	0	0,00
Mpunda	784	0	0	0	0	0,00
Kota Bima	3.464	0	0	3	3	0,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima, diolah

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Angka Kematian Ibu di Kota Bima pada Tahun 2015 sebesar 0,87 artinya bahwa di Kota Bima pada tahun 2015 terdapat 1 kematian maternal per 1.000 kelahiran hidup. Jika dilihat menurut wilayah Kecamatan, angka kematian ibu tertinggi Kecamatan Asakota yakni 1,39 diikuti Kecamatan Rasanae Barat yakni 2,50 dan Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Mpunda tidak terdapat Angka Kematian Ibu. Kematian



Ibu/maternal bisa disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan kehamilan atau memburuk akibat kehamilan, atau disebabkan karena pertolongan kelahiran yang tidak tepat (tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kelalaian. Kematian maternal ini dapat dicegah dengan adanya penanganan professional dalam pemeliharaan kehamilan dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.

B. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Pengertian Angka Melek Huruf (AMH) menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka melek huruf merupakan persentase/proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari.

Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk:

- a. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- b. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- c. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Secara umum Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Bima pada periode 2009-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 AMH Kota Bima tercatat sebesar 92,80%, .Dalam kurun 2010 hingga 2011 AMH mengalami peningkatan, yaitu dari 93,80% di tahun 2011, 93,80% dan pada akhir tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar 77,58%, pada akhir tahun 2013 meningkat lagi yaitu 95,91 dan tahun 2014 96,57 Kondisi ini menunjukkan



bahwa hampir 100 persen penduduk Kota Bima mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia. Dengan tingginya angka melek huruf ini, pemerintah Kota Bima telah berhasil memberantas buta huruf, namun AMH di akhir tahun 2015 terjadi penurunan kembali yaitu sebesar 90,87%.

Tabel. 4.5**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bima**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	100,507	111,426	120,088	124,848	131,611	101.351
Angka Melek Huruf (%)	93,70	93,80	77,58	95,91	96,57	90,87
Angka Buta Huruf (%)	6,3	6,23	6,2	4,09	3,43	9,13

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah
Dikpora Kota Bima, diolah**

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

APM murid di Kota Bima untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat 97,63 persen. Sementara APM SMP/MTs 118,69 %, dan APM SMA/MA ini



menggambarkan bahwa semua penduduk usia sekolah (usia SLTP/ sederajat, SLTA/ Sederajat) yang bersekolah dan adanya penduduk yang berasal dari Kabupaten lain yang bersekolah di Kota Bima Sehingga APM lebih dari 100 % tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 4.6.
Perkembangan angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2010 s.d 2015 Kota Bima

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI						
	Jumlah siswa kelompok Usia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16.174	16.937	15.461	13.286	12.672	18,702
	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	16.357	17.182	16.715	13.760	13.136	19,154
	- APM SD/MI	98,88%	98,57%	92,49%	96,56%	96,46%	97.63%
2.	SMP/MTs						
	Jumlah siswa kelompok Usia 13 - 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	8.413	8.696	7.134	5.826	5.331	9,368
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	8.870	9.161	8.162	6.287	5.531	7,892
	- APM SMP/MTs	94,85%	94,92%	87,49%	92,67%	96,38%	118.69%
3.	SMA/MA/SMK						
	Jumlah siswa kelompok Usia 16 - 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	8.652	10.646	8.375	7.410	6.893	10,154
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun	9.043	12.207	9.302	8.155	7.450	9,572
	- APM SMA/MA/SMK	95,68%	87,21%	90,03%	90,87%	92,53%	106.07%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah



Tabel 4.7.

Angka Partisipasi Murni Tahun 2015 menurut Kecamatan

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
	Jumlah siswa usia 7 - 12 tahun bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun	APM (%)	Jumlah siswa usia 13 - 15 tahun bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	APM (%)	Jumlah siswa usia 16 - 19 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 6 - 19 tahun	APM (%)
RasanaE Barat	4.926	16.575	29,72	2.968	7.916	37,49	3.321	6.635	50,05
RasanaE Timur	2.062		12,44	841		10,62	170		2,56
Asakota	3.499		21,11	1.291		16,31	1.384		20,86
Raba	4.540		27,39	1.306		16,50	2.759		41,58
Mpunda	3.675		22,17	2.962		37,42	4.250		64,05
Jumlah	18.702		112,83	9.368		118,34	11.884		179,11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk, kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa angka partisipasi kasar (APK) di Kota Bima untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat 97,64% sementara SLTP/Sederajat dan SMA/Sederajat lebih dari 100 persen. Capaian angka ini menunjukkan bahwa semua penduduk usia sekolah SLTP dan SLTA di Kota Bima sedang/masih bersekolah dengan kata lain bahwa partisipasi penduduk Kota Bima sampai



dengan SLTP/ sederajat sampai SMA/ sederajat sudah baik. Tingginya APK (di atas 100%) diduga masih ada anak-anak umur di atas 12 tahun tetapi masih bersekolah di tingkat SLTP dan SLTA atau adanya siswa yang lebih muda dari umur standar (dibawah 7 tahun) yang sudah masuk jenjang pendidikan SD/ Sederajat. Demikian pula untuk tingkat SLTP, juga ada yang datang dari kabupaten lain yang mengenyam pendidikan di Kota Bima.

Tabel 4.8.**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bima**

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI						
	- Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	17.349	17.869	18.141	18.098	19.259	18.702
	- Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	16.357	18.558	18.758	18.958	19.154	19.154
	- APK SD/MI	106,06	96,29	96,71	95,46	100,55	97,64
2.	SMP/MTs						
	- Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	8.877	8.835	9.248	9.418	4.767	9.368
	- Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	8.870	7.522	7.622	7.682	7.892	7.892
	- APK SMP/MTs	100,08	117,46	121,33	122,6	60,4	118,7
3.	SMA/MA/SMK						
	- Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	11.759	11.423	11.623	11.350	10.789	10.154
	- Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun	9.054	9.272	9.322	9.372	9.572	9.572
	- APK SMA/MA/SMK	129,88	123,2	124,68	121,11	112,71	106,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah



4. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan yang ditamatkan.

Tabel. 4.9

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2009 s.d 2015

No.	APT	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD	98,21%	98,10%	100%	96,01%	99,87%	100%	100%
2.	SMP	94,34%	97,70%	99,96%	91,43%	99,67%	100%	100%
3.	SMA	87,58%	98,40%	98,62%	96,62%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah

C. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isupenting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika ada pertumbuhan ekonomi otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam



menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

1. Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/ Pencari Kerja)

a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan definisi tenaga kerja menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh uang/pendapatan atau membantu melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam tidak terputus selama seminggu sebelum pencacahan (wawancara dalam pengumpulan data). Batasan ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya bidang ketenagakerjaan yang membatasi usia minimum seorang pekerja adalah 15 tahun. Penentuan batas usia pensiun atau batas usia kerja maksimal penduduk tidak ditetapkan dalam UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan (batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja-PK, Peraturan Perusahaan-PP/Perjanjian Kerja Bersama-PKB), atau berpedoman pada beberapa UU yang mengatur hak – hak yang berkaitan dengan masa pensiun, seperti UU Jamsostek, UU



mengenai Dana Pensiun atau UU Kepegawaian berikut turunannya, serta UU mengenai profesi tertentu. Konsepsi penduduk usia kerja yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan Kota Bima ini adalah penduduk berumur 15 – 64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan atau disebut penduduk yang aktif secara ekonomi (*Economically Active Population*), sedangkan sisanya yaitu mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (cacat, penerima pendapatan dan lain sebagainya) digolongkan sebagai bukan angkatan kerja (*Non Economically Active Population*). Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun.

Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Tabel 4.10
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Bima Tahun 2015

KELOMPOK UMUR	TENAGA KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15 – 19	5.808	12,55	5.838	12,13	11.646	12,33
20 – 24	5.780	12,49	5.721	11,88	11.501	12,18
25 – 29	6.140	13,27	6.266	13,02	12.406	13,14
30 – 34	6.175	13,34	6.502	13,51	12.677	13,43
35 – 39	5.433	11,74	5.815	12,08	11.248	11,91
40 – 44	4.771	10,31	4.988	10,36	9.759	10,34
45 – 49	4.135	8,94	4.514	9,38	8.649	9,16
50 – 54	3.259	7,04	3.528	7,33	6.787	7,19
55 – 59	2.886	6,24	3.013	6,26	5.899	6,25
60 – 64	1.889	4,08	1.958	4,07	3.847	4,07
TOTAL	46.276	49,01	48.143	50,99	94.419	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah



Jumlah dan proporsi tenaga kerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin Kota Bima adalah 68,49 persen.

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa proporsi tenaga kerja tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase tenaga kerja perempuan lebih tinggi (50,99%) dibandingkan tenaga kerja laki-laki (49,01%). Dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labour*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labour*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi pula.

b. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)

Secara struktural angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Penduduk usia kerja atau biasa disebut tenaga kerja (*man power*) dipilah kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labour force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja (bukan termasuk angkatan kerja) ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Misalnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan.



Dari tabel 4.11 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Bima cukup besar yakni 73.674 orang atau lebih dari separuh (63,92%) jumlah tenaga kerja atau lebih dari separuh jumlah tenaga kerja berpartisipasi dalam pasar kerja, baik bekerja ataupun yang belum/tidak bekerja (pengangguran). Lebih dari setengah (65,09%) dari jumlah angkatan kerja adalah laki-laki dan hampir setengahnya (34,91%) adalah angkatan kerja perempuan. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.11
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Bima, Tahun 2015

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA					
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
15 - 19	1,409	3.74	1,054	7.38	2,463	4.74
20 - 24	2,933	7.79	1,618	11.32	4,551	8.76
25 - 29	5,419	14.40	2,583	18.08	8,002	15.41
30 - 34	6,027	16.01	2,565	17.95	8,592	16.55
35 - 39	5,394	14.33	1,892	13.24	7,286	14.03
40 - 44	4,619	12.27	1,352	9.46	5,971	11.50
45 - 49	4,089	10.86	1,247	8.73	5,336	10.28
50 - 54	3,248	8.63	950	6.65	4,198	8.08
55 - 59	2,57	6.83	614	4.30	3,184	6.13
60 - 64	1,929	5.13	413	2.89	2,342	4.51
TOTAL	37,637	72,48	14,288	27,52	51,925	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Tabel 4.11 juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja perempuan (72,48 % dan 27,52%), hal ini diduga bahwa perempuan lebih banyak yang menjadi ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga.

Selanjutnya angkatan kerja yang bekerja atau seseorang melakukan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau membantu menghasilkan upah, gaji, pendapatan atau penghasilan atau didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan yang menghasilkan nilai tambah sehingga diperhitungkan dalam penghitungan sistem neraca nasional



2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja menggambarkan banyaknya angkatan kerja yaitu penduduk yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Angka Partisipasi Angkatan kerja bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 4.12
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja, Angka Penyerapan Angkatan Kerja Kota Bima, Tahun 2015

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	APAK
	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja			
15-19	124	2,339	2,463	9,183	11,646	21.15
20-24	1,237	3,314	4,551	6,950	11,501	39.57
25-29	4,903	3099	8,002	4,404	12,406	64.50
30-34	7,138	1,454	8,592	4,085	12,677	67.78
35-39	6,606	680	7,286	3,962	11,248	64.78
40-44	5,609	362	5,971	3,788	9,759	61.18
45-49	5,081	255	5,336	3,313	8,649	61.69
50-54	4,052	146	4,198	2,589	6,787	61.85
55-59	3,054	130	3,184	2,715	5,899	53.98
60-64	2,221	121	2,342	1,505	3,847	60.88
Jumlah	40,025	11,900	51,925	42,494	94,419	54.99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Dari tabel 4.12 terlihat bahwa angkatan kerja yang bekerja tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun. Penyerapan angkatan kerja atau persentase angkatan kerja yang bekerja di Kota Bima cukup tinggi (67,78%) ini membuktikan bahwa pemerintah kota Bima menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja.

Semakin tinggi Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif. Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk yang berumur 15-19 tahun mempunyai APAK lebih rendah, sedangkan penduduk yang berumur 25-29 memiliki APAK yang tinggi.



3. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah dan Proporsi Penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja disetiap lapangan pekerjaan.

Proporsi Penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja disuatu Daerah pada waktu tertentu.

Tabel 4.13
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja, Angka Penyerapan Angkatan Kerja, Kota Bima, Tahun 2015

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk bekerja	% Penduduk Bekerja
PENSIUNAN	360	0.55
PEGAWAI NEGERI SIPIL	7,052	10.74
TENTARA NASIONAL INDONESIA	301	0.46
KEPOLISIAN RI	611	0.93
PERDAGANGAN	490	0.75
PETANI PEKEBUN	5,521	8.41
PETERNAK	63	0.10
NELAYAN PERIKANAN	779	1.19
INDUSTRI	17	0.03
KONSTRUKSI	22	0.03
TRANSPORTASI	320	0.49
KARYAWAN SWASTA	3,043	4.64
KARYAWAN BUMN	473	0.72
KARYAWAN BUMD	111	0.17
KARYAWAN HONORER	3,408	5.19
BURUH HARIAN LEPAS	978	1.49
BURUH TANI PERKEBUNAN	1,168	1.78
BURUH NELAYAN PERIKANAN	66	0.10
BURUH PETERNAKAN	17	0.03
PEMBANTU RUMAH TANGGA	86	0.13
TUKANG CUKUR	6	0.01
TUKANG LISTRIK	21	0.03
TUKANG BATU	534	0.81
TUKANG KAYU	479	0.73
TUKANG SOL SEPATU	9	0.01
TUKANG LAS PANDAI BESI	40	0.06
TUKANG JAHIT	96	0.15
TUKANG GIGI	4	0.01
PENATA RIAS	10	0.02
PENATA RAMBUT	10	0.02



MEKANIK	96	0.15
SENIMAN	8	0.01
TABIB	1	0.00
PARAJI	2	0.00
PERANCANG BUSANA	2	0.00
PENTERJEMAH	1	0.00
IMAM MESJID	2	0.00
PENDETA	8	0.01
WARTAWAN	55	0.08
USTADZ MUBALIGH	6	0.01
JURU MASAK	3	0.00
ANGGOTA DPR RI	0	0.00
ANGGOTA DPD	0	0.00
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0.00
DUTA BESAR	0	0.00
BUPATI	0	0.00
WALIKOTA	1	0.00
WAKIL WALIKOTA	1	0.00
ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0.00
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA	17	0.03
DOSEN	160	0.24
GURU	27,038	41.19
PENGACARA	13	0.02
NOTARIS	11	0.02
AKUNTAN	1	0.00
KONSULTAN	19	0.03
DOKTER	57	0.09
BIDAN	90	0.14
PERAWAT	92	0.14
APOTEKER	5	0.01
PENYIAR RADIO	1	0.00
PELAUT	69	0.11
PENELITI	3	0.00
SOPIR	622	0.95
PIALANG	4	0.01
PARANORMAL	2	0.00
PEDAGANG	516	0.79
PERANGKAT DESA	23	0.04
KEPALA DESA	0	0.00
BIARAWATI	2	0.00
WIRASWASTA	10,596	16.14
LAINNYA	12	0.02
JUMLAH PENDUDUK	65,635	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah



4. Pengangguran (Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja) dan Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja atau terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja dengan kata lain tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenagakerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenagakerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Tingkat pengangguran mempunyai beberapa karakteristik yakni pengangguran menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, menurut pendidikan yang ditamatkan, dan menurut wilayah kecamatan.

Tabel 4.14
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja, Angka Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Bima, Tahun 2015

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja		
15-19	124	2.339	2.463	9.183	94,97
20-24	1.237	3.314	4.551	6.950	72,82
25-29	4.903	3099	8.002	4.404	38,73
30-34	7.138	1.454	8.592	4.085	16,92
35-39	6.606	680	7.286	3.962	9,33
40-44	5.609	362	5.971	3.788	6,06
45-49	5.081	255	5.336	3.313	4,78
50-54	4.052	146	4.198	2.589	3,48
55-59	3.054	130	3.184	2.715	4,08
60-64	2.221	121	2.342	1.505	5,17
Jumlah	40.025	11.900	51.925	42.494	22,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah



Tabel 4.14. menunjukkan angkatan kerja yang belum/tidak bekerja (penganggur) dan tingkat penganggur menurut umur. Dari 73.674 orang angkatan kerja di Kota Bima, 24.507 orang (22,92%) adalah pengangguran. Secara umum, komposisi penganggur terbuka selama tahun 2015 di dominasi oleh golongan umur muda, yakni umur 15-24 tahun. Di antara kelompok umur tersebut, golongan 15-19 tahun adalah yang paling besar jumlahnya yakni 2.339 orang (94,97%).

Saat ini pengangguran usia muda (15-24 tahun) di Kota Bima mencapai 47,50 persen. Persentase pengangguran usia muda ini cukup tinggi dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Bima untuk membina agar mereka dapat bersaing di pasar kerja. Hal yang perlu diperhatikan pemerintah Kota Bima adalah bahwa angka pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti memberikan bekal ketrampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Latar belakang mengapa kelompok usia muda itu ikut terjun ke pasar kerja, antara lain diduga kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia kerja. Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut terjebak dalam kelompok pengangguran, sehingga menambah akumulasi jumlah penganggur menjadi lebih banyak lagi.



D. Sosial

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Penyandang masalah kesejahteraan sosial melanda hampir seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar, termasuk di Kota Bima.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dari Tabel 4.15 dan di bawah ini menunjukkan bahwa PMKS terbesar adalah PMKS lain 99,10%, disusul kemudian pemulung 0,30%, waria 0,21%, lepra/kusta 0,16%, pengemis 0,14%, serta WTS 0,10%.

Tabel 4.15
Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Tahun 2015 di Kota Bima

NO	JENIS PMKS	L	P	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	74	86	160
2	Anak Terlantar	185	110	295
3	Anak Nakal	189	6	195
4	Anak jalanan	0	0	0
5	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	5	0	5
6	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	43	30	73
7	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	153	93	246
8	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah	42	45	87
9	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	0	1.425	1.425



10	Koban Tindak Kekerasan	71	512	583
11	Lanjut Usia Terlantar	516	1.140	1.656
12	Penyandang Disabilitas (Cacat)	545	415	960
13	Tuna Susila	0	14	14
14	Pengemis	83	22	105
15	Gelandangan	38	32	70
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	565	41	606
17	Korban Penyalagunaan Napza	133	2	135
18	Keluarga Fakir Miskin			8.160
19	Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni			180
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis			276
21	Komoditas Adat terpencil			0
22	Korban Bencana Alam			957
23	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi			51
24	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	189	403	592
25	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	2	3
26	Keluarga Rentan			494
27	Eks. Pengidap Penyakit Kusta	10	20	30
28	Penduduk di Daerah Rawan Bencana			980
JUMLAH		2.842	4.398	18.338

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya adalah penyandang cacat. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.



2. Penduduk Miskin

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 4.19 di bawah terlihat bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk) yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bima pada Tahun 2011 turun sebesar 0,21 persen yakni sebesar 18.146 (12,60 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Tahun 2010 yang berjumlah 18,264 (12,81 persen). Sedangkan pada Tahun 2012 juga terjadi penurunan sebesar 0,25 persen yakni sebesar 18,069 (12,35 persen) dibanding Tahun 2011. Hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Bima setiap tahun semakin menurun, ini berarti bahwa Pemerintah Kota Bima mampu menanggulangi tingkat kemiskinan walaupun secara bertahap.



Tabel 4.16.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk,
Kota Bima Tahun 2010 s/d 2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	Kota	Desa	Kota + Desa		
2010	256.552	202.096	224.912	18.264	12,81
2011	259.827	206.323	228.659	18.146	12,6
2012	257.779	215.743	233.283	18.069	12,35
2013	258.758	218.687	235.269	18.012	11,49
2014	266.660	241.083	251.820	16.187	9,91
2015	-	-	-	-	-

Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bima

Garis Kemiskinan (GK) tahun 2010 sebesar Rp 224.912 per kapita per bulan dan lebih tinggi dibanding garis kemiskinan Tahun 2011 yang sebesar Rp 228.659 per kapita perbulan atau meningkat 7,56 persen, sedangkan garis kemiskinan tahun 2012 . Sebesar Rp. 233.283 atau meningkat 1,00 persen. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2010 adalah 2,46 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,69. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2011 adalah 5,06 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,63, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2012 adalah 2,33 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,62, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2013 adalah 2,24 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,61 sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2014 adalah 1,76 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,44.

Sementara tahun 2015 belum diketahui garis kemiskinan juga indeks kemiskinan. Perkembangan kondisi kemiskinan di Kota Bima tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini.

**Tabel 4.17****Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bima Tahun 2015**

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Jumlah Penduduk Miskin	18.146	18.069	18.012	16.187	-
Persentase Penduduk Miskin (P0)	12,6	12,35	11,49	9,91	-
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	228.659	233.283	235.269	238.721	-
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	5,06	2,33	2,24	1,76	-
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,63	0,62	0,61	0,44	-

Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bima



BAB V

MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi (Mobilitas Permanen)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Atau dengan kata lain, migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya. Todaro, mengatakan bahwa migrasi lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi.

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non-permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi. sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat kabupaten/kota. kecamatan maupun desa/kelurahan.

**Tabel 5.1.****Jumlah Migrasi Masuk, Jumlah Migrasi Keluar, Angka Migrasi Masuk, Angka Migrasi Keluar, dan Angka Migrasi Neto menurut Kecamatan, Kota Bima, Tahun 2015**

KECAMATAN	MIGRASI MASUK (Datang)			MIGRASI KELUAR (Pindah)			Mi	Mo	Mn
	ANTAR KAB/KOTA	ANTAR PROV	JML	ANTAR KAB/KOTA	ANTAR PROV	JML			
RASANA E BARAT	990	266	1.256	1.403	2.366	3.769	0,91	2,75	-1,83
RASANA E TIMUR	406	239	645	426	1.878	2.304	0,47	1,68	-1,21
ASAKOTA	758	234	992	1.011	1.790	2.801	0,72	2,04	-1,32
RABA	1.035	312	1.347	1.352	2.266	3.618	0,98	2,64	-1,65
MPUNDA	916	286	1.202	1.461	2.284	3.745	0,88	2,73	-1,85
KOTA BIMA	4.105	1.337	5.442	5.653	10.584	16.237	3,96	11,83	-7,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Ket. :

Mi : In Migration (Migrasi Masuk)

Mo : Out Migration (Migrasi Keluar)

Mn : Net Migration

Konstanta 100

Migrasi penduduk keluar Kota Bima (pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang tahun 2015 adalah 16.237 orang. Jika diperhatikan menurut wilayah Kecamatan maka penduduk pindah terbesar di wilayah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 3.769 orang dan diikuti Kecamatan Mpunda yaitu 3.745 orang, diikuti Wilayah Kecamatan Raba yaitu 3.618 orang, diikuti wilayah Kecamatan Asakota yaitu 2.801 orang, sedangkan yang paling sedikit Kecamatan Rasanae Timur yakni 2.304 orang.

Keadaan penduduk pendatang atau migrasi penduduk masuk Kota Bima (datang) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang tahun 2015 adalah 5.442 orang. Jika diperhatikan menurut wilayah maka penduduk datang terbesar di wilayah Kecamatan Raba yaitu 1.347 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah Kecamatan RasanaE Timur yakni 645 orang.



Selanjutnya dari tabel 5.1 terlihat bahwa angka migrasi keluar Kota Bima yaitu 3,96, artinya bahwa dari 100 orang penduduk Kota Bima terdapat 3 - 4 orang penduduk yang keluar dari wilayah ini. Jika dilihat menurut wilayah, angka tertinggi migrasi keluar di wilayah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 2,75 artinya bahwa dari 100 penduduk di wilayah Kecamatan Rasanae Barat terdapat 2-3 orang yang keluar dari wilayah ini dan angka migrasi keluar terendah di Kecamatan Rasanae Timur yaitu 1,68 yakni dari 100 penduduk Wilayah Kecamatan Asakota terdapat 1-2 orang penduduk yang keluar dari wilayah ini.

Tabel 5.1. di atas juga menunjukkan angka migrasi masuk ke Kota Bima yakni sebesar 11,83 artinya dari 100 penduduk terdapat 11-12 orang pendatang di Kota Bima. Jika dilihat menurut wilayah Kecamatan, wilayah dengan angka migrasi masuk tertinggi adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 2,75 dimana dalam setiap 100 penduduk terdapat 2-3 orang penduduk pendatang (migrasi masuk) dan paling rendah adalah Kecamatan RasanaE Timur yakni 0,47 dimana dalam setiap 100 penduduk terdapat 1 pendatang (migrasi masuk di Kecamatan RasanaE Timur

Tabel 5.2.**Angka Migrasi Masuk, Angka Migrasi Keluar, Kecamatan , Tahun 2015**

KECAMATAN	ANGKA MIGRASI MASUK			ANGKA MIGRASI KELUAR		
	ANTAR KAB/KOTA	ANTAR PROV	JML	ANTAR KAB/KOTA	ANTAR PROV	JML
RASANA E BARAT	0,72	0,19	0,91	1,02	1,72	2,75
RASANA E TIMUR	0,30	0,17	0,47	0,31	1,37	1,68
ASAKOTA	0,55	0,17	0,72	0,74	1,30	2,04
RABA	0,75	0,23	0,98	0,98	1,65	2,64
MPUNDA	0,67	0,21	0,88	1,06	1,66	2,73
KOTA BIMA	2,99	0,97	3,96	4,12	7,71	11,83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti KTP-Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta – akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan peng-administrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Menurut Undang-undang No.24 Tahun 2013 Pada Pasal 1 Ketentuan Angka 13 Berbunyi ; Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama,



susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Kartu Keluarga menjadi salah satu persyaratan dalam pelayanan publik di Kota Bima, sehingga pada prinsipnya hampir semua keluarga memiliki Kartu Keluarga. Selain itu, adanya program pemberian Nomor Induk Kependudukan Nasional (NIK Nasional), telah mendorong penduduk Kota Bima untuk mengganti dokumen KK yang dimilikinya dengan KK yang Berbasis NIK Nasional. Dari kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak **38.628** atau **94.83 %** dengan perincian sebagaimana terlihat dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1.

Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Bima Tahun 2015

KECAMATAN	Jumlah Keluarga yang memiliki KK	Jumlah Keluarga yang belum memiliki KK	Jumlah Kepala Keluarga	Prosentase Kepemilikan KK (%)
RasanaE Barat	7.510	408	7.918	94,85
RasanaE Timur	4.779	152	4.931	96,92
Asakota	7.469	293	7.762	96,23
Raba	9.514	873	10.387	91,60
Mpunda	7.359	271	7.630	96,45
KOTA BIMA	36.631	1.997	38.628	94,83 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2015

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan signifikan dalam pengurusan dokumen Kartu Keluarga, yang mana terlihat bahwa wilayah Kecamatan Rasanae Timur merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK tertinggi yaitu dengan 96,92% yang diikuti wilayah Kecamatan Mpunda yakni 96,45%, Kecamatan Asakota 96,23%, Kecamatan Rasanae Barat 94,85% Sedangkan wilayah Kecamatan Raba merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK terendah 91.60% dan untuk



keseluruhan capaian kepemilikan Kartu Keluarga dalam Kota Bima yaitu 36.631 dari 36.628 Keluarga atau Sebesar 94,83%.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Seperti halnya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan pelayanan publik lainnya di Kota Bima, sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP. Adanya program penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di Kota Bima pada Tahun 2011, mengharuskan semua penduduk wajib KTP di Kota Bima untuk melakukan penyerapan KTP-Elektronik, yang meliputi biodata, sidik jari, iris mata, tanda tangan penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah penduduk Kota Bima yang memiliki KTP-Elektronik dan telah melakukan penyerapan/perekaman KTP-Elektronik adalah **85.726** jiwa atau **89.31%** sebagaimana terlihat dalam tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) Kota Bima Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP			Jumlah Kepemilikan KTP			Prosentase Kepemilikan KTP		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
RasanaE Barat	9.843	10.298	20.141	8.680	9.240	17.920	88,18	89,73	88,97
RasanaE Timur	5.890	6.133	12.023	5.212	5.418	10.630	88,49	88,34	88,41
Asakota	9.751	9.647	19.398	8.365	8.446	16.811	85,79	87,55	86,66
Raba	12.360	13.237	25.597	10.959	11.896	22.855	88,67	89,87	89,29
Mpunda	9.094	9.730	18.824	8.461	9.049	17.510	93,04	93,00	93,02
Kota Bima	46.938	49.045	95.983	41.677	44.049	85.726	88,79	89,81	89,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2015

Tabel 6.2. menunjukkan bahwa prosentase kepemilikan KTP penduduk wajib KTP tertinggi di Kecamatan Mpunda (93,02%) dan terendah di Kecamatan Asakota (86,66%).

C. Kepemilikan Akta

Akta catatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdampak hukum terhadap status keperdataan seseorang. Oleh karenanya setiap penduduk yang mengalami



peristiwa penting wajib dicatatkan untuk mendapatkan akta catatan sipil sebagai bukti hukum atas peristiwa penting tersebut.

Akta catatan sipil meliputi 5 jenis, yaitu akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, dan akta pengakuan anak. Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi, dll. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusanya sebuah perkawinan.

Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F.1.01, khususnya informasi tentang kepemilikan akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan anak, menyebabkan sulitnya memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK.

1. Pencatatan Kelahiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk melaksanakan amanat ini, Pemerintah Kota Bima telah berupaya untuk memberikan pelayanan akta kelahiran kepada masyarakat tanpa dipungut biaya atau bebas biaya

**Tabel 6.3.****Jumlah Pencatatan Kelahiran menurut Wilayah Kecamatan Kota Bima Tahun 2015**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Mencatat Kelahiran		
	L	P	L + P
RasanaE Barat	4.288	4.023	8.311
RasanaE Timur	3.023	2.899	5.922
Asakota	4.662	4.194	8.856
Raba	6.470	5.883	12.353
Mpunda	4.750	4.676	9.426
Kota Bima	23.193	21.675	44.868

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2015

Tabel 6.3. di atas menunjukkan bahwa jumlah pencatatan kelahiran tahun 2015 yaitu sebanyak 44.868 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 21.675 jiwa dan laki-laki sebanyak 23.193 jiwa.

2. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Data kepemilikan akta perkawinan sebagaimana tabel 6.5 di bawah ini

Tabel 6.5.**Pencatatan Perkawinan Di Kota Bima Tahun 2015**

Kecamatan	Pencatatan Perkawinan
RasanaE Barat	13
RasanaE Timur	0
Asakota	8
Raba	3
Mpunda	2
KOTA BIMA	26

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Dari tabel 6.5 terlihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan pencatatan perkawinan tahun 2015 sebanyak 9 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang memeluk agama selain Islam adalah sangat sedikit sekali yakni 0.01 persen, berarti penduduk Kota Bima mayoritas penganut agama Islam.

3. Pencatatan Perceraian

Akta cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Di Kota Bima tidak ada yang mencatat perceraianya selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Ini menandakan bahwa penduduk Kota Bima mayoritas Islam sehingga penduduk yang mencatat perceraianya bukan pada Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil tetapi mereka mencatatnya di Pengadilan Agama.

4. Pencatatan Kematian

Administrasi kependudukan bukan saja dibutuhkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), yang masih hidup namun juga berlaku, untuk yang telah meninggal dunia. Fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran. Masyarakat perlu segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian. Karena terkait status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun pribadi. Terlebih beberapa tahun kedepan, akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris (intinya agar mempermudah urusan administrasi, bagi keluarga yang ditinggalkan). Kondisi saat ini, kesadaran masyarakat pembuat akta kematian masih kurang.

Selain akta kematian mempunyai banyak fungsi dengan kaitan persoalan penentuan hukum privat maupun publik, kepemilikan akta kematian jika dikaitkan dengan pelaporan kematian akan mendukung pendataan penduduk yang lebih akurat dari sisi jumlah penduduk. Jika pelaporan kematian ini tidak berjalan dengan benar, maka biodata alm. akan tetap terdaftar dalam database kependudukan, sehingga akan selalu muncul problem mengenai jumlah penduduk yang tidak sesuai antara *de facto* dengan *de jure*.

Tabel 6.6.

Pencatatan Kematian Di Kota Bima Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk Mencatat Kematian / Akta Kematian		
	L	P	L + P
RasanaE Barat	67	59	126
RasanaE Timur	44	56	100
Asakota	63	55	118
Raba	79	100	179
Mpunda	42	51	93
KOTA BIMA	295	321	616

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari tabel 6.6 terlihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan pencatatan kematian tahun 2015 sebanyak 616 jiwa dengan rincian laki-laki 295 jiwa dan perempuan 321 jiwa.

KEGUNAAN dari Akta Kematian ini ialah :

- Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
- Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
- Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya
- Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

D. Pengakuan, Pengesahan Dan Pengangkatan Anak Dan Peristiwa Penting Lainnya.

Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Sedangkan pengesahan anak adalah pengesahan status anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan orang tua anak tersebut. Berbeda dengan pengakuan anak dan pengesahan anak yang memperkuat hubungan hukum keperdataan anak dengan orang tua kandungnya, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari



lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.



BAB VII PENUTUP

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2015 merupakan gambaran perkembangan kependudukan serta capaian/dampak keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bima pada tahun 2014.

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2015 ini adalah data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik yang diproses database kependudukan SIAK maupun manual, serta data kependudukan dari instansi terkait lainnya, seperti BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dikpora.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima ini diharapkan akan bermanfaat menjadi salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan berbagai bidang agar aspiratif terhadap kondisi dan kebutuhan penduduk, juga bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.

Untuk perbaikan penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan komitmen dan dukungan berbagai pihak khususnya SKPD yang berkaitan dengan kependudukan, sehingga Profil Perkembangan Kependudukan tahun mendatang akan lebih baik, lengkap, akurat, dan tepat waktu. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2015 ini masih jauh dari sempurna, namun saya berharap semoga informasi dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini bermanfaat.